

**EFEKTIVITAS FUNGSI PERENCANAAN DAN
PENGEVALUASIAN DANA DESA DI DESA
SARAMBU KECAMATAN POREHU
KABUPATEN KOLAKA UTARA**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Diajukan Oleh

MISNA

1904030185

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN BISNIS SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

**EFEKTIVITAS FUNGSI PERENCANAAN DAN
PENGEVALUASIAN DANA DESA DI DESA
SARAMBU KECAMATAN POREHU
KABUPATEN KOLAKA UTARA**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Diajukan Oleh

MISNA

1904030185

Pembimbing :

Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.El., M.E.I.

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN BISNIS SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Misna
Nim : 1904030185
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau dipublikasikan dari tulisan atau karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Demikian pernyataan saya ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 09.0kt 2023

Yang membuat pernyataan



Misna
Misna

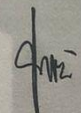
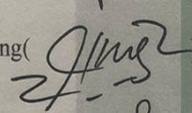



19 0403 0185

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Efektivitas Fungsi Perencanaan dan Pengevaluasian Dana Desa di Desa Sarambu Kecamatan Porehu Kabupaten Kolaka Utara yang ditulis oleh Misna, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1904030185, mahasiswa Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis, tanggal 09 Agustus 2023 Miladiyah bertepatan dengan 21 Muharram 1445 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Palopo, 04 Oktober 2023

TIM PENGUJI

1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I. Ketua Sidang ()
2. Akbar Sabani S.E.I., M.E Sekretaris Sidang ()
3. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I Penguji I ()
4. Edi Indra Setiawan, S.E., M.M Penguji II ()
5. Dr. Muh Ruslan Abdullah S.E.I., M.A Pembimbing ()

Mengetahui

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I.
NIP 19820124 200901 2 006

Ketua Program Studi
Manajemen Bisnis Syariah

Akbar Sabani, S.E.I., M.E
NIDN 200504058501

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah menganugerahkan rahmat, hidayat serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Efektivitas Fungsi Perencanaan dan Pengevaluasian Dana Desa di Desa Sarambu Kecamatan Porehu Kabupaten Kolaka Utara.” Setelah melalui proses yang panjang.

Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. Kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana ekonomi dalam bidang Manajemen Bisnis Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada orang tua saya tercinta **Ibu Rahmi dan Bapak Rais**, yang telah mengasuh mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya, serta semua saudara yang selama ini membantu dan mendoakan. Mudah-mudahan Allah SWT. Mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak. Serta penelliti juga mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Dr. Abbas Langaji, M.Ag, Wakil Rektor bidang akademik dan kelembagaan Dr. Munir Yusuf, M.Pd. Wakil Rektor bidang administrasi umum, perencanaan dan keuangan Dr. Masruddin, S.S., M.Hum. dan wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan kerjasama Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI, di IAIN Palopo
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI. Wakil Dekan bidang akademik Dr. Fasiha, M.EI, Wakil Dekan bidang Adm. Umum perencanaan dan keuangan Muzayyana Jabani, S.T., M.M. Wakil Dekan bidang kemahasiswaan dan kerjasama Muhammad Ilyas, S.Ag., M.A.
3. Ketua Prodi Manajemen Bisnis Syariah Bapak Akbar Sabani, S. Ei., M. Ei. dan Penasehat Akademik Bapak Burhan Rifuddin, S.E.,M.M.
4. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.E.I.,M.A. Selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi ini.
5. Penguji 1 Dr. Fasiha S.EI M.EI dan Penguji II Edi Indra Setiawan S.E. MM.
6. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
7. H. Madehang, S.Ag., M.Pd, selaku kepala Unit Perpustakaan beserta karyawan dan karyawan dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literature yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

8. Kepala Desa Sarambu, aparat dan seluruh masyarakat desa Sarambu kecamatan Porehu kabupaten Kolaka Utara, yang telah memberikan izin penelitian serta memberikan informasi dan data terkait penelitian ini.
9. Seluruh rekan seperjuangan MBS G angkatan 2019 khususnya Isma, Ibtidah, Devi, Susan, dan Ayu, yang telah memberikan support baik tenaga, waktu dan motivasi kepada saya untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada Eka Saputri, terimakasih selalu ada dalam segala hal, yang selalu menemani meluangkan waktu, mendukung ataupun menghibur dalam kesedihan dan memberikan semangat untuk terus maju tanpa kenal kata menyerah dalam segala hal untuk meraih apa yang menjadi impian saya.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan keikhlasan pihak-pihak yang telah memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis mengharapkan agar tulisan ini dapat bermanfaat dan menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait didalamnya dan khususnya bagi penulis sendiri.

Palopo, 10 Juni 2023

Misna

1904030185

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab – Latin

Pedoman Transliterasi Arab Latin pada penulisan skripsi ini mengacu pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣ	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ya
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍẓ	Ḍẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (´).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أِ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	A dan I
أِ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ ... آ...	<i>Fathah dan Alif atau ya</i>	Ā	A dengan garis di atas
إِ f	<i>Kasrah dan ya</i>	ī	I dan garis di atas
أُ و	<i>Ḍammah dan wau</i>	ū	U dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, dan *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik menjadi *â*, *î*, dan *û*. model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh :

مَاتَ : mâtâ

رَمَى : ramâ

يَمُوتُ : yamûtu

4. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *Fathah*, *Kasrah* dan *Dammah* transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau kata yang terakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasi kandungan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydîd)*

Syaddah atau *Tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah *Tasydîd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjaīnā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعَمَّ : *nu'ima*

عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh :

عَلِيٌّ : 'alī (bukan 'aly atau 'aliyy)

عَرَبِيٌّ : 'arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)

6. Kata sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang transliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qomariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *Al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *Al-zalzalah* (*az-zalzalah*)

الفَلْسَفَةُ : *Al-falsafah*

أَلْبِلَادُ : *Al-bilādu*

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contoh

:

تَأْمُرُونَ : ta'murūna

النَّوْءُ : al-nau'

شَيْءٌ : syai'un

أَمْرٌ : umirtu

8. Penulisan Bahasa Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata Istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt bi 'umūm al-lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafẓ al-Jalālah* ditransliterasikan dengan huruf [t].

Contoh :

هُمُفِيْرَحْمَةِاللَّهِ : *hum fi raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*) dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia (EYD) yang berlaku. Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama dalam permulaan kalimat.

Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR).

Contoh :

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

·Syahru Ramaḍān al-laẓī unẓila fih al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-munqiz min al-Ḍalāl

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt., = *Subhanahu Wa Ta'ala*

Saw., = *Sallallahu 'Alaihi Wasallam*

H = Hijrah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

L = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

W = Wafat tahun

QS = *Qur'an, Surah* HR = Hadits Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PRAKATA	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	vi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR AYAT	xv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN TEORI	8
A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
B. Deskripsi Teori	17
1. Efektivitas	17
2. Perencanaan	22
3. Pengevaluasian	25
4. Dana Desa	27
C. Kerangka Pikir	35
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	37
B. Tempat dan Waktu Penelitian	37
C. Subjek/Informan Penelitian	38
D. Devinisi Istilah	38
E. Teknik Pengumpulan Data	40
F. Teknik Pengabsahan Data	41
G. Teknik Analisis Data	42
H. Data dan Sumber Data	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	45
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	45
B. Hasil Penelitian	55
C. Pembahasan	66
BAB V PENUTUP	71
A. Simpulan	71
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA 73
LAMPIRAN



DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 QS Ar-Rad :13.....	18
Kutipan Ayat 2 QS Al-Insyirah	19



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Laporan Jumlah Penduduk Desa Sarambu Tahun 2020	52
Tabel 4.2 Anggaran Pendapatan Transfer Desa Sarambu 2019-2022	52
Tabel 4.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sarambu 2022	53
Tabel 4.4 Analisis Epektifitas Perencanaan	60
Tabel 4.5 Analisis Evaluasi Perencanaan	66



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Kerangka Pikir	37
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sarambu	49



ABSTRAK

Misna, 2023. “Efektivitas Fungsi Perencanaan Dan Pengevaluasian Dana Desa Di Desa Sarambu Kecamatan Porehu Kabupaten Kolaka Utara”. Skripsi Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing Oleh Muh. Ruslan Abdullah.

Skripsi ini membahas tentang efektivitas fungsi perencanaan dan pengevaluasian dana desa di Desa Sarambu Kecamatan Porehu Kabupaten Kolaka Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas fungsi perencanaan dana desa di desa sarambu kecamatan porehu kabupaten kolaka utara dan untuk mengetahui apakah pengevaluasian dana desa sudah efektif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Subjek penelitian yaitu aparat desa dan masyarakat. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan juga dokumentasi. Lokasi penelitian ini bertempat di desa sarambu kecamatan porehu kabupaten kolaka utara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses perencanaan dana desa sudah dapat dikatakan efektif karena sudah sesuai dengan indikator proses perencanaan, dimana indikatornya yaitu perencanaan di desain secara baik, memperoleh dukungan dari manajemen puncak, perencanaan berfokus pada implementasi, memilih orang-orang yang tepat. sedangkan pada proses pengevaluasian sudah dapat dikatakan efektif karena sudah sesuai dengan indikator pengevaluasian dimana indikatornya yaitu sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.

Kata Kunci : Dana Desa, *Efektivitas*, Perencanaan, Pengevaluasian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belflaking

Dalam undang-undang N0 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah diatur mengenai pelaksanaan System desentralisasi di Negara Indonesia, dimana pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan serangkaian proses, mekanisme dan tahapan perencanaan yang dapat menjamin keselarasan pembangunan.¹

Desa merupakan salah satu penyelenggara pemerintah desa, pembangunan dan kemasayarakatan perlu difasilitasi dan didukung dengan anggaran yang cukup untuk memenuhi pembangunan desa agar tercapainya pemberdayaan masyarakat desa yang menyeluruh.²

Desa Sarambu merupakan desa yang berada di Kecamatan Porehu Kabupaten Kolaka Utara, yang merupakan desa yang terpencil dan berada di daerah pegunungan. Masyarakat Desa Sarambu sebagian besar berprofesi sebagai petani. Desa Sarambu sementara ini masih dalam proses pembangunan salah satu yaitu pembangunan fisik yaitu jalan rabat beton, saluran air yang bersumber dari gunung, gedung pertemuan, lapangan, dan lain-lain. Desa Sarambu adalah salah satu desa di Kecamatan Porehu yang mempunyai masalah diantaranya yaitu tertinggalnya dalam hal pembangunan desa dibandingkan dengan pembangunan desa lainnya di

¹ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia “Lembaga Pemerintahan”, 11 Maret 2020, <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/33.pdf>

² R Widodo Triputro, *Regulasi Desa* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019). 45

Kecamatan Porehu salah satunya yaitu tertinggalnya dalam hal pembangunan drainase. Saat ini Desa Sarambu membutuhkan pendanaan yang seimbang untuk menjalankan peran yang lebih konkret dalam pembangunan desa. Masyarakat desa sarambu berharap dengan adanya Dana Desa, perencanaan partisipasi berbasis masyarakat akan lebih berkelanjutan, karena masyarakat dapat langsung terlibat dalam pembuatan dokumen perencanaan di desanya dan ikut merealisasikannya.

**Tabel 1.1 Anggaran Pendapatan Transfer Desa Sarambu Tahun
2019 – 2022**

No.	Tahun	Uraian	Anggaran (Rp)
1	2019	Dana Desa	1.284.030.000
		Jumlah Pendapatan	1.752.694.395
2	2020	Dana Desa	1,293,067,045
		Jumlah Pendapatan	1,299,067,045
3	2021	Dana Desa	1,146,821,000
		Jumlah Pendapatan	1,615,171,000
4	2022	Dana Desa	1,284,030,000
		Jumlah Pendapatan	1,757,694,395

Sumber: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019-2022

Segala kegiatan pembangunan tidak terlepas dari perencanaan. perencanaan merupakan proses modernisasi perubahan menyeluruh dari masyarakat tradisional atau pro-modern ke bentuk penguasaan teknologi dan perubahan organisasi sosial masyarakat dengan meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan stabilisasi politik

sebagaimana yang terjadi di dunia barat.³ Sementara itu, menganggap perencanaan sebagai upaya peningkatan kapasitas untuk mempengaruhi masa depan dengan beberapa implikasi berupa pemberian perhatian terhadap kapasitas, segala yang perlu dilakukan untuk mengembangkan kemampuan, dan tenaga untuk membuat perubahan yang mencakup keadilan, mengingat perhatian yang berat sebelah ke kelompok tertentu dapat memecah belah masyarakat sehingga bisa mengurangi kapasitasnya, dan penumbuhan kuasa dan wewenang tertentu, mereka akan menerima manfaat pembangunan.⁴

Mengingat program-program yang terselenggara melalui pemanfaatan Dana Desa sejatinya merupakan program pembangunan, sudah selayaknya jika di dalamnya juga melibatkan kajian perencanaan agar tujuan-tujuan yang hendak dicapai dapat terwujud secara optimal. Akan tetapi, jika melihat di dalam undang-undang, peraturan pemerintah, hingga keputusan-keputusan menteri yang membarengi Dana Desa tersebut, aspek perencanaan sedikit sekali dilibatkan, bahkan hampir nihil. Sebagian besar dari peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah tersebut hanya berisikan dasar pembagian Dana Desa, arahan penggunaan, pelaksanaan, tujuan, prioritas, dan prinsip-prinsip penggunaan Dana Desa. Padahal, sebagaimana diketahui bersama, pemerintah desa sebagai pelaksana program pemanfaatan Dana Desa tersebut juga memerlukan bekal-bekal ilmu perencanaan mengingat disadari atau tidak, mereka akan melakukan proses-proses

³ Muhammad Fadli Efendi, *Pengelolaan Dana Hibah Oleh Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance* (Malang: Guepedia,2022).62.

⁴Muhammad Fadli Efendi, *Pengelolaan Dana Hibah Oleh Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance* (Malang: Guepedia,2022).63.

perencanaan tersebut dalam menyusun program program pembangunan dari Dana Desa tersebut. Apalagi dalam prinsip penggunaan Dana Desa yang disebutkan pada Buku Pintar Dana Desa terbitan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, terdapat penekanan pada swakelola masyarakat yang berarti pelaksanaannya dilakukan secara mandiri dengan pemberdayaan sumber daya alam desa, tenaga, pikiran, dan keterampilan warga desa, dan kearifan lokal, yang semuanya membutuhkan perencanaan yang matang agar dapat terlaksana dengan baik.

Penelitian-penelitian tentang Dana Desa yang mengkaji dari aspek perencanaan dirasa masih sangat terbatas. Sebagian besar masih berfokus pada akuntabilitas pengelolaan yakni pelaksanaan dan pengorganisasian yang ditinjau dari aspek ekonomi.

Dalam Jurnal Meutia dan Liliana mengkaji tentang pengelolaan keuangan Dana Desa dengan studi kasus di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Dalam penelitian tersebut diketahui bahwa dalam pengelolaan keuangan secara umum, Dana Desa telah dilaksanakan sesuai dengan aturan Permendagri No. 113/2014 dan mematuhi prinsip dasar pengelolaan keuangan. Akan tetapi, masalah pelaporan dan pertanggungjawaban masih menjadi masalah di beberapa desa sehingga mengakibatkan ketimpangan dalam pelaksanaan pembangunan.⁵ Sementara itu, Aziz dalam penelitiannya tentang Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa mendapati bahwa pelaksanaan penggunaan Dana Desa masih belum efektif lantaran belum memadainya kapasitas dan kapabilitas pemerintah desa. Selain itu, peran

⁵ Inten Meutia, Liliana, "(Retraced) Pengelolaan Keuangan Dana Desa," Jurnal Akutansi Multiparadigma, Vol. 8 No. 2 (2020): 336-352

serta masyarakat secara aktif dalam pengelolaan Dana Desa juga belum terlihat.⁶ Sofiyanto, Mardani, dan Salim pun pernah mengkaji tentang Dana Desa yang berfokus pada pengelolaan Dana Desa dalam upaya meningkatkan pembangunan di desa Banyuates, kecamatan Banyuates, kabupaten Sampang. Dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa pengelolaan Dana Desa secara teknis maupun administratif telah sesuai dengan peraturan yang ada dengan pemerintah desa cukup serius dalam mengelola Dana Desa untuk meningkatkan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia di desa tersebut. Alhasil, Dana Desa pun memberikan dampak positif terhadap pembangunan desa baik di bidang pembangunan fisik maupun pembangunan manusianya.⁷

Berdasarkan kajian dari tiga jurnal di atas, menunjukkan bahwa kompetensi pengorganisasian, pelaksanaan dan kepatuhan terhadap arahan-arahan atau peraturan-peraturan pemerintah yang berlaku menjadi hal yang sangat penting dalam pelaksanaan program pemanfaatan Dana Desa. Kendati demikian, sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, ketiganya belum menyentuh aspek perencanaan dalam kajian tentang Dana Desa.

Evaluasi-evaluasi terhadap program pemanfaatan Dana Desa sendiri sudah sering dilakukan, baik oleh pemerintah sendiri maupun para peneliti. Evaluasi dari pemerintah menunjukkan bahwa Dana Desa telah memberikan manfaat yang cukup besar bagi masyarakat. Dari Dana Desa ini, berbagai sarana dan prasarana publik

⁶ Aziz, "Otonomi Desa Dan Efektivitas Dana Desa (*The Village Autonomy and The Effectiveness of Village Funds*)", Jurnal Penelitian Politik, Vol. 13, No. 2 (2020) 193-211.

⁷ Sofiyanto, Ronny, Agus Salim, " Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang", Elektronik Jurnal Riset Manajemen, Vol. 6, No. 4 (2020), 28.

desa telah terbangun, seperti jalan, jembatan, sambungan air, drainase/irigasi, pasar desa, polindes, PAUD.

Hal yang cukup menarik, evaluasi tersebut didapat dari penilaian manfaat Dana Desa secara keseluruhan dan masih belum menyorot keterkaitannya dengan pembangunan, apakah program hasil pemanfaatan Dana Desa itu sudah sesuai dengan perencanaan desa atau hanya sekedar mengikuti arahan pemerintah, meniru program dari desa lain, atau memang ada pertimbangan khusus yang melatarbelakangi program tersebut. Dan ketika ditelisik lebih dalam, tidak sedikit program-program yang dihasilkan dari Dana Desa ini pada kenyataannya belum berjalan dengan optimal dan kurang dapat dirasakan manfaatnya oleh warganya sendiri. Beberapa desa mungkin telah berhasil menjalankan program Dana Desa ini, namun tidak sedikit pula desa yang berujung pada kegagalan dan justru menjadi lumbung korupsi baru bagi sejumlah aparat desa yang tidak bertanggung jawab. Ketua Departemen Luar Negeri Badan Pelaksana Pusat (BPP) Dewan Pengurus Pusat (DPP) Serikat Petani Indonesia (SPI), Zainal Arifin Fuad, mengemukakan kegagalan fatal program Dana Desa.

Dari penjelasan-penjelasan di atas, dirasa perlu adanya tinjauan teori perencanaan dalam program pemanfaatan Dana Desa. Dengan mempertimbangkan pentingnya perencanaan dalam setiap program pembangunan, tinjauan (pengevaluasian) terhadap teori perencanaan dirasa perlu untuk mengetahui apakah program-program pemanfaatan Dana Desa yang diselenggarakan pemerintah desa sudah sesuai dengan teori perencanaan atau belum.

Dengan melakukan penelitian terkait fungsi perencanaan dan pengevaluasian terhadap dana desa diharapkan dapat diketahui kesesuaian program pemanfaatan Dana Desa terhadap teori perencanaan yang berlaku selama ini. Jika memang program pemanfaatan Dana Desa selama ini dilakukan tidak sesuai dengan teori perencanaan, bisa jadi hal tersebut menjadi salah satu faktor mengapa Dana Desa dirasa belum memberikan dampak efektif dalam pembangunan.

Dipilihnya perencanaan karena awal program yang menentukan hasil akhir dan pengevaluasian dana desa karena peneliti ingin mengetahui bagaimana desa dapat merancang penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa yang efektif sehingga pemerintah desa mampu memberikan perkembangan pembangunan yang baik kepada masyarakat desa selain itu dengan adanya perencanaan yang sedemikian rupa yang menghasilkan penetapan anggaran pendapatan dan belanja desa segala kegiatan pelaksanaan dapat dilakukan secara tertib dan teratur sesuai dengan rancangan yang telah ada. Peneliti juga ingin meneliti apakah pemerintah desa sudah menjalankan perencanaan dana desanya sesuai peraturan menteri dalam negeri tentang pengelolaan keuangan desa sehingga pembangunan desa di desa srambu dapat terealisasi dengan efektif sesuai dengan target perencanaan anggaran dana desa yang di anggarkan disana.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian **“Efektivitas Fungsi Perencanaan Dan Pengevaluasian Dana Desa Di Desa Srambu Kecamatan Porehu Kabupaten Kolaka Utara ”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan diatas , maka dirumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana efektivitas fungsi perencanaan dana desa di desa srambu kecamatan porehu kabupaten kolaka utara?
- b. Bagaimana efektivitas fungsi pengevaluasian dana desa di desa srambu kecamatan porehu kabupaten kolaka utara?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui efektivitas fungsi perencanaan dana desa di desa srambu kecamatan porehu kabupaten kolaka utara.
- b. Untuk mengetahui efektivitas pengevaluasian dana desa di desa srambu kecamatan porehu kabupaten kolaka utara.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut maka manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dan kontribusi ilmiah dalam pengembangan ilmu pengetahuan mengenai manajemen khususnya manajemen keuangan tentang pengetahuan yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa.

2. Manfaat akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan menambah kajian ilmu dalam dunia pengetahuan tentang manajemen khususnya manajemen keuangan yang berfokus pada fungsi perencanaan dan pengevaluasian pengelolaan dana desa.

3. Manfaat praktis

- a. Bagi peneliti sebagai wahana aplikasi ilmu yang didapat selama kuliah.
- b. Bagi Mahasiswa FEBI IAIN Palopo diharapkan dapat memberikan informasi tentang efektivitas fungsi perencanaan dan pengevaluasian dana desa.
- c. Bagi pihak lain, sebagai bahan bacaan untuk memberikan wawasan dan informasi untuk penelitian selanjutnya
- d. Hasil penelitian diharapkan dapat berguna bagi seluruh yang membutuhkan dan menjadi sumbangsih peneliti terhadap input bagi Pemerintah Desa.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian penulis sebagai sumber untuk mendukung penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Skripsi Alfianto 2020 dengan judul “*Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur*”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang memfokuskan pada Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur, yang bertujuan untuk mengetahui pengelolaan alokasi dana desa di kecamatan burau kabupaten luwu timur dan untuk mengetahui apa saja hambatan pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Burau.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait persoalan Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur terdapat tiga tahapan antara lain, tahap perencanaan, pengelolaan dan tahap pertanggung jawaban, pemerintah desa sebagai penanggung jawab penuh terhadap Alokasi Dana Desa telah mengelola ADD sesuai dengan prioritas ADD di tahun 2019 dan menjadikan peraturan Bupati Luwu Timur (Perlup) No.1 tahun 2019 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincisan dana desa dan alokasi dana desa setiap desa tahun anggaran 2019 sebagai pedoman dalam pengelolaan ADD di tahun 2019 sudah bisa dikategorikan sangat efektif namun dalam proses

perealisasiannya belum optimal.⁸ Perbedaan pada penelitian ini, penelitian diatas membahas tentang efektivitas pengelolaan alokasi dana desa sedangkan penelitian ini membahas efektivitas fungsi perencanaan dan pengevaluasian dana desa dan yang membedakan juga lokasi penelitian. Persamaan penelitian diatas adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif dan dalam penelitian ini sama-sama membahas Dana Desa.

Skripsi Harmin Aksa 2020 dengan judul “ *Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (Studi Kasus Pada Rinca Kecamatan Komodo Provinsi Nusa Tenggara Timur)*”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas pemanfaatan dana desa dalam menunjang pembangunan pemberdayaan masyarakat Pedesaan di Desa Pulau Rinca Kecamatan Komodo Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Adapun hasil yang dicapai dari penelitian Desa Pulau Rinca Kecamatan Komodo Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah efektif, di dukung oleh indikator-indikator antara lain: tepat kebijakan, tepat pelaksanaan, tepat target, tepat lingkungan, dan tepat proses.⁹Perbedaan pada penelitian ini terletak pada lokasi penelitian dan penelitian diatas membahas tentang pemanfaatan dana desa sedangkan penelitian ini membahas fungsi perencanaan dan pengevaluasian dana

⁸ Alfianto, *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur, Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo*, 2020, <http://journal.stiem.ac.id/index.php/jurakun/article/view/518%0Ahttp://journal.stiem.ac.id/index.php/jurakun/article/viewFile/518/340>.

⁹ Harmin Aksa, *Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Meninjang Pembangunan Pemberdayaan masyarakat Pedesaan (Studi Kasus pada Rinca Kecamatan Komodo Profinsi Nusa Tenggara Timur)*”. dalam Skripsi Universitas Muhammadiyah Mataram, Tahun 2020

desa. Persamaan penelitian diatas adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif dan dalam penelitian ini sama-sama membahas Dana Desa.

Stefani Glorya Sumolang, Ivonne Saerang, Joubert B Maramis 2021 dengan judul “ *Efektivitas Perencanaan Dana Desa di Desa Sea Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa*”. Penelitian ini menggunakan metode data deskriptif kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk penjelasan secara jelas dan terperinci, yang bertujuan untuk mengetahui apakah Perencanaan Dana Desa di Desa Sea Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa apakah sudah efektif. Adapun hasil yang dicapai pada penelitian ini yaitu Efektivitas pengelolaan alokasi dana desa pada desa sea, kecamatan pineleng, Sulawesi utara tahun 2016 sampai dengan 2020 berada pada kategori efektif, karena tingkat efektivitas tiap tahun berada pada angka 90%-100% (efektif).¹⁰ Perbedaan pada penelitian ini terletak pada lokasi penelitian dan fokus penelitiannya. Persamaan penelitian diatas adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif dan dalam penelitian ini sama-sama membahas perencanaan Dana Desa.

Salma Banna Kadang, Alden Laloma, Deysi Tampongangoy 2021 dengan judul “*Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Meko Kecamatan Pamona Barat Kabupaten Poso*”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk mengetahui apakah Efektivitas Pengelolaan dana desa di desa meko kecamatan pamona barat kabupaten poso sudah efektif. Dalam melihat efektivitas dana desa, ada lima indikator yang tujuan

¹⁰ Stefani Glorya Sumolang, Ivonne Saerang, "Efektivitas Perencanaan Dana Desa di Desa Sea Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa", Jurnal EMBA, Vol .9 No. 4 (2021): 973–82.

yang berkaitan dengan efektivitas pengelolaan yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*aktuating*) dan pengawasan (*controlling*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada perencanaan pengelolaan dan desa di desa meko sudah maksimal namun belum semua tokoh masyarakat berperan di dalamnya, kemudian pada pengorganisasian sudah efektif dapat dilihat dari sistem pembagian tugas yang melibatkan seluruh warga desa Meko baik pemerintah maupun masyarakat dilibatkan secara langsung, pada sisi pelaksanaan berdasarkan fakta di lapangan sudah dilaksanakan dengan baik, namun ada beberapa kendala yang sering dihadapi salah satunya yaitu kehabisan material yang mengakibatkan pelaksanaan program yang disepakati dalam musrembang desa terhambat dan terakhir yaitu tahap pengawasan yang sudah dilakukan dengan baik, namun pada sisi pelaporan dan pertanggung jawaban masih belum dilaksanakan secara terbuka dari pihak yang berperan dalam pengelolaan dana desa.¹¹ Perbedaan pada penelitian ini terletak pada lokasi penelitian dan penelitian diatas membahas tentang pengelolaan dana desa sedangkan penelitian ini membahas fungsi perencanaan dan pengevaluasian dana desa. Persamaan penelitian diatas adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif dan dalam penelitian ini sama-sama membahas Dana Desa.

Kaharuddin dan Rusli 2021 dengan judul “*Evaluasi Program Dana Desa*” penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif deskriptif, penelitian

¹¹ Salma Banna Kadang, Alden Laloma, “Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Meko Kecamatan Pamona Barat Kabupaten Poso”, Jurnal Manajemen, Vol. 7, No. 103 N0. 103 (2021) 100-114.

ini dimaksudkan untuk melakukan evaluasi terhadap seluruh komponen dalam implementasi program dana desa. Penelitian evaluasi ini menggunakan model evaluasi CIPP. Model evaluasi CIPP adalah singkatan dari *Context*, *Input*, *process* dan *Product*. Pemilihan model CIPP merupakan kerangka yang komperenship untuk mengarahkan pelaksanaan evaluasi formatif dan evaluasi sumatif terhadap objek program, proyek, personalia, produk, institusi dan System. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan kepada para pemangku kepentingan terkait rekomendasi hasil akhir penelitian. Berdasarkan hasil riset evaluasi Context. 87,51% untuk evaluasi input. 71,42% untuk evaluasi Process dan 87,51% untuk evaluasi Product. Berdasarkan hasil penelitian merekomendasikan agar program dilanjutkan dengan beberapa perbaikan dan penyempurnaan. ¹² Perbedaan penelitian diatas membahas tentang evaluasi program dana desa sedangkan penelitian ini membahas tentang Fungsi perencanaan, fungsi pengevaluasian kepada dana desa, Persamaan penelitian diatas adalah sama-sama membahas tentang fungsi pengevaluasian dana desa.

Dewi Nurmalasari, Endang Irawan Supriyadi 2021 dengan judul "*Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung)*". Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di desa Cigondewah Hilir

¹² K Kaharuddin and R Rusli, "Evaluasi Program Dana Desa," *Forum Ekonomi* 23, no. 4 (2021).623–31.

Kecamatan Margasih Kabupaten Bandung. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di desa Cigondewah Hilir sudah berjalan efektif, dilihat dari 3 indikator pengukuran efektivitas yakni pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi dengan hasil capaian desa Cigondewah Hilir termasuk desa kategori maju.¹³ Perbedaan penelitian diatas terletak pada lokasi penelitian dan penelitian diatas membahas tentang efektivitas pengelolaan dana desa sedangkan penelitian ini membahas tentang efektivitas fungsi perencanaan dan pengevaluasian dana desa. Persamaan penelitian ini dengan penelitian diatas adalah sama-sama membahas tentang dana desa dan sama-sama menggunakan metode kualitatif.

Irwansyah 2021, dengan judul “*Efektivitas Kebijakan Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur*”. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi dengan paradigma interpretif sebagai payung penelitian, yaitu pendekatan yang menjabarkan kondisi atau objek penelitian sebagaimana kejadiannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas kebijakan dana desa dalam pembangunan infrastruktur.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, efektivitas dana desa dalam pembangunan infrastruktur di desa Rompu dinilai tepat. Diperoleh hasil yaitu tepat pelaksanaan, tepat target, tepat kebijakan dan tepat lingkungan. Dengan adanya kebijakan dana desa, masyarakat Rompu telah menerima dan menikmati manfaatnya, yakni akses masyarakat Rompu dalam sehari-hari lebih mudah, tepat

¹³ Dewi Nurmalasari and Endang Irawan Supriyadi, “Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Margasih Kabupaten Bandung),” *Jurnal Identitas* 1, no. 1 (2021): 64–74, <https://doi.org/10.52496/identitas.v1i1.105>.

pelaksanaan, bahwa pemerintah desa Rompu telah melakukan kerja sama yang baik dengan masyarakat, pemerintah kota/Kabupaten Luwu Utara dan pihak swasta. Tepat target, bahwa pembangunan yang dilakukan telah sesuai dengan target di APBDes. Tepat lingkungan, bahwa koordinasi yang dilakukan pemerintah desa Rompu dengan masyarakat dan pemerintah kota/Kabupaten Luwu Utara telah baik, serta dilingkungan eksternal kebijakan media massa telah memberikan informasi terkait pembangunan-pembangunan di Desa Rompu.¹⁴ Perbedaan, pada penelitian diatas membahas mengenai efektivitas kebijakan dana desa terhadap pembangunan infrastruktur sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai efektivitas fungsi perencanaan dan pengevaluasian dana desa dan juga penelitian diatas menggunakan metode pendekatan fenomenologi dengan paradigma interpretif sebagai payung penelitian. Persamaan penelitian diatas adalah sama-sama membahas mengenai dana desa.

Arif Purnomo, Budi Setiyono, Yuwanto 2023 dengan judul “*Efektivitas Kerja: Pemerintah Desa Dalam Mengelola Dana Desa*”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan menjelaskan efektivitas pengelolaan dana desa oleh Pemerintah Desa Modang Mas, Kecamatan Mentobi Raya, Kabupaten Lamandau.

Adapun Hasil penelitian ini menunjukkan efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Modang Mas sudah efektif. Hal ini dibuktikan dengan kejelasan tujuan untuk pembangunan dan pemberdayaan, strategi untuk mencapai tujuan yang

¹⁴ Irmansyah Irmansyah, Sri Wahyuni Mustafa, and Rahmad Solling Hamid, “Efektivitas Kebijakan Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur,” *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)* 4, no. 2 (2021): 1086–95, <https://doi.org/10.36778/jesya.v4i2.479>.

digunakan melibatkan masyarakat, perencanaan yang dilakukan atas dasar tujuan bersama serta penyusunan program dituliskan pada rencana kerja pemerintah desa. Adapun faktor yang mendukung yaitu dana desa menjadi pemasukan bagi desa, kerja sama antar lembaga desa, keterlibatan masyarakat, unggulnya Sumber daya aparatur desa dan akses jaringan internet sudah memadai.¹⁵ Perbedaan penelitian ini, pada penelitian diatas membahas mengenai efektivitas kerja pemerintah desa dalam mengelola desa sedangkan pada penelitian ini membahas tentang efektivitas fungsi perencanaan dan pengevaluasian dana desa dan juga berbeda pada lokasi penelitiannya. Persamaan penelitian diatas adalah sama-sama membahas mengenai dana desa dan sama-sama menggunakan metode kualitatif.

Putri Antou, Vekie A. Rimate, Mauna Maramis 2020 dengan judul *"Efektivitas Dana Desa Terhadap Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara"*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Deskriptif, data yang dikumpulkan dengan metode wawancara, penyebaran kuesioner dan dokumentasi pada 12 desa yang ada di kecamatan Talawaan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat tingkat efektivitas Dana desa dari 12 desa yang ada di kecamatan Talawaan kabupaten minahsa utara pada tahun 2015-2018 dari segi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Adapun hasil penelitian menunjukkan efektivitas dana desa Talawaan terhadap pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat desa talawaan berada dalam kategori sangat efektif, hambatan yang di alami dalam merealisasikan dana desa

¹⁵ Dalam Mengelola and Dana Desa, "Efektivitas Kerja : Pemerintah Desa" 11, no. 1 (2023): 107–12, <https://doi.org/10.37081/ed.v11i1.4303>.

yaitu pemahaman masyarakat terhadap Dana desa dan pencairan alokasi dana desa yang terlambat. Solusi untuk memberikan kebijakan terhadap pengelolaan dan penyaluran Dana Desa dengan tetap memperhatikan penguatan peran dan kelembagaan pemerintah. Pengelolaan anggaran desa pada berbagai bidang yang ada memerlukan manajerial dan akun tabel dalam menjaga agar dana yang ada dapat di salurkan sesuai dengan yang di rencanakan. perlu memperhatikan pula kesejahteraan para pekerja agar kegiatan ekonomi dapat berjalan secara efektif dan efisien, menjaga agar stabilitas fiskal tetap terkendali dan kemampuan untuk membuat sejumlah terobosan atau inovasi yang efektif.¹⁶ Perbedaan, penelitian diatas membahas tentang efektivitas dana desa terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sedangkan pada penelitian ini membahas tentang efektivitas fungsi dana desa dan fungsi pengevaluasian dana desa dan juga perbedaannya terletak pada lokasi penelitian. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai dana desa.

Halimatus Sakdiyah, Ika Lis Mariatun, Zaiful Arief 2022 dengan judul *"Efektivitas Penggunaan Dana Desa (DD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Bila porah Tahun 2021"*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penggunaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan Desa Bila porah Tahun 2021.

¹⁶ Putri Antou, Vekie Rumante, and Mauna TH B Maramis, "Efektivitas Dana Desa Terhadap Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara," *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 19, no. 02 (2020): 131–40.

Adapun hasil penelitian ini adalah secara keseluruhan penggunaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan desa bila porah dimulai dari tahapan perencanaan dan pelaksanaan sudah dikatakan efektif, namun pada tahap pertanggung jawaban penggunaan dana desa belum berjalan efektif dikarenakan tidak adanya evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah desa bersama masyarakat tentang pembangunan yang sudah dilaksanakan. Oleh sebab itu dalam tahap pertanggung jawaban sebaiknya pemerintah desa melakukan rapat evaluasi bersama masyarakat sebagai bentuk transparansi pemerintah kepada masyarakat. Perbedaan, pada penelitian diatas membahas tentang efektivitas penggunaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan desa sedangkan pada penelitian ini membahas tentang efektivitas fungsi perencanaan dan pengevaluasian dana desa, dan juga terletak pada lokasi penelitiannya. Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai dana desa dan sama-sama menggunakan metode kualitatif.

B. Deskripsi Teori

1. Efektivitas

Efektivitas adalah suatu pengukuran terhadap penyelesaian suatu pekerjaan tertentu dalam organisasi dalam mencapai tujuannya berhasil atau tidaknya pekerjaan yang dilakukan.¹⁷ Efektivitas adalah sebagai organisasi kerja artinya yang menjadi sorotan adalah terwujudnya berbagai macam sasaran yang telah

¹⁷ Arman Maulana Siti Rosmayati, *Manajemen Koperasi* (Jakarta, Indonesia: Guepedia, 2020). 124.

ditentukan pada waktu yang tepat, nah dengan menggunakan sumber-sumber itulah maka hasil-hasil tersebut dapat tercapai dalam waktu yang telah ditentukan.¹⁸

Dari kedua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian dari efektivitas adalah segala sesuatu yang kegiatannya dilakukan oleh setiap individu maupun kelompok atau organisasi yang bertujuan untuk mencapai target sasaran yang ingin dicapai dalam bentuk hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan kata lain efektivitas adalah langka-langka atau metode yang telah ditetapkan. Ketetapan metode langka-langka yang diukur dari segi kehematan waktu, biaya dan tenaga serta mampu memberi manfaat kepada pihak-pihak yang memberikan dan menetapkan tujuan yang telah disepakati bersama.

Kata efektivitas berasal dari kata effective, berhasil, tepat, atau manjur. Efektivitas menunjukkan taraf tercapai suatu tujuan, suatu usaha dikatakan efektif apabila yang direncanakan berhasil dan mencapai tujuan. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau semacamnya dan tidak terdapat tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.

Adapun pengukuran efektivitas dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana yang telah disepakati sebelumnya dengan hasil rencana yang sudah terealisasi. Dapat dikatakan tidak efektif, jika antara usaha dan tindakan yang dilakukan tidak sesuai yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan

¹⁸ Rheza Pratama, *Pengantar Manajemen* (Yogyakarta: Anggota Ikapi, 2020). 8.

yang diharapkan. Berikut kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagai berikut :¹⁹

- 1) Tujuan yang akan dicapai jelas, berarti pada pemerintah desa melaksanakan tugas dapat mencapai tujuan yang terarah.
- 2) Pencapaian tujuan strategi yang jelas, bahwasanya strategi merupakan mengikuti alur yang sesuai dalam melakukan berbagai upaya untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan.
- 3) Adanya proses analisis dan penetapan kebijakan, dimanah dengan adanya kebijakan maka akan mampu mencapai tujuan-tujuan melalui usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- 4) Perencanaan yang matang maka akan memberikan suatu keputusan yang akan di ambil untuk organisasi dimasa depan.
- 5) Terencananya penyusunan program dengan tepat karena untuk menjadi pedoman dalam melakukan suatu tindakan.
- 6) Salah satu indikator efektivitas dalam organisasi yaitu kemampuan bekerja yang secara produktif dan didukung dengan adanya sarana dan prasarana yang tersedia.
- 7) Pelaksanaan yang efektif dan efisien, karena apabila tidak dilaksanakan dengan efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mampu mencapai tujuannya.

¹⁹ Piki Darma Kristrian Pardede Asima Yanti Siahaan, Transformasi Pembangunan Melalui Pelayanan Publik (Jawa Tengah: PT Tena Persada Kerta Utama, 2022). 342.

Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah dalam merealisasi keuangan alokasi dana desa untuk melaksanakan program yang direncanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi nilai riil. Efektivitas fungsi Perencanaan merupakan kegiatan yang sangat penting untuk mencapai sebuah tujuan yang sudah ditetapkan dalam sebuah organisasi, dikatakan efektif apabila tujuan yang dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Efektivitas perencanaan agar berjalan dengan baik ada beberapa hal yang harus diperhatikan diantaranya adalah:²⁰

- 1) Tersedianya sumber daya – sumber daya yang dibutuhkan.
- 2) Tersedianya teknologi
- 3) Struktur organisasi yang stabil
- 4) Sarana prasarana yang mendukung
- 5) Pimpinan mempunyai kemampuan dalam mengelola organisasi
- 6) Melibatkan tenaga kerja dalam proses perencanaan.

Efektivitas fungsi evaluasi merupakan salah satu tipe evaluasi kebijakan yang menilai apakah hasil dan dampak suatu program kebijakan sesuai dengan yang diharapkan, apakah tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud, dan apakah dampak yang diharapkan sebanding dengan usaha yang telah dilakukan.²¹

Dalam Penelitian efektivitas dana desa maka indikator yang digunakan adalah :²²

²⁰ Rachmatullaily Tinakartika Rinda, Pengantar Manajemen Bisnis (Jakarta: ALFABETA , 2022). 67.

²¹ Surtya Dailiati, Kebijakan Retribusi Kebersihan Dalam Meningkatkan Kepuasan Masyarakat (Surabaya: CV Jakad Publishing, 2018). 108.

²² Velentine Siagian, Bonaraja Purba, Ekonomi dan Bisnis Indonesia (Yogyakarta : Yayasan Kita Menulis, 2020). 149.

- 1) Penyerapan tenaga kerja melalui kegiatan padat karya.
- 2) Pemanfaatan BUMDES dalam mengelola potensi desa sebagai sumber pendapatan masyarakat, mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan pembangunan serta perbaikan sarana prasarana desa.
- 3) Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa seperti keterlibatan wanita, penyandang cacat dan masyarakat miskin, keterlibatan masyarakat dalam penyusunan APBDes.
- 4) Peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan masyarakat desa.
- 5) Peningkatan indeks pembangunan masyarakat desa.

2. Perencanaan

Perencana dalam arti seluas-luasnya merupakan suatu proses mempersiapkan secara sistematis mempersiapkan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efektif dan efisien.²³

Pada dasarnya fungsi perencanaan adalah untuk membantu proses pengambilan keputusan terbaik yang sesuai dengan tujuan organisasi. Pada pelaksanaannya, proses perencanaan yang dilakukan harus menjawab pertanyaan 5W + 1H, yaitu:

- 1) What: Apa tujuan yang ingin dicapai organisasi?

²³ Tjokroamidjojo, Pengantar Akutansi Pembangunan (Jakarta: PT Penerbit Qiara Media, 2011). 11.

- 2) Why: Mengapa hal tersebut menjadi tujuan organisasi?
- 3) Where: Dimanah lokasi yang paling tepat untuk mencapai tujuan tersebut?
- 4) When: Kapan pekerjaan harus diselesaikan agar tujuan tercapai (berhubungan dengan jadwal)?
- 5) Who: Siapa orang-orang yang tepat yang harus dipilih untuk melaksanakan pekerjaan sehubungan dengan tujuan organisasi?
- 6) How: Bagaimana metode atau cara melaksanakan pekerjaan dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.

a. Fungsi Perencanaan

Fungsi perencanaan adalah merupakan fungsi terpenting dalam manajemen, karena fungsi ini akan menentukan fungsi-fungsi manajemen lainnya. Fungsi dari fungsi manajemen secara keseluruhan. Tanpa adanya fungsi perencanaan tidak mungkin fungsi manajemen lainnya akan dapat dilaksanakan dengan baik. Perencanaan merupakan suatu keniscayaan, sebuah keharusan di samping sebagai sebuah kebutuhan. Dalam Q.S AL-Anfal 60 :²⁴

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ
وَعَدُوَّكُمْ وَأَخْرَيْنَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

“Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan berkuda yang kamu miliki dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu, dan orang-

²⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Surabaya: CV Karya Utama , 2020),651.

orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan di zalimi (dirugikan).”

Ayat diatas menjelaskan segala sesuatu harus terencana dengan kemaslahatan /kebijaksanaan.

b. Manfaat Perencanaan

Manfaat perencanaan bagi setiap organisasi adalah sebagai berikut :

- 1) Sebagai alat pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan organisasi.
- 2) Untuk memilih dan menentukan prioritas dari beberapa alternatif/pilihan yang ada.
- 3) Untuk mengarahkan dan menuntun pelaksanaan kegiatan sehingga tertib dan teratur menuju tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
- 4) Untuk menghadapi dan mengurangi ketidakpastian dimasa yang akan datang.
- 5) Ke semuanya itu, perencanaan yang baik mendorong tercapainya tujuan, misalnya laba dan sebaliknya menurunkan biaya yang dikeluarkan organisasi.

Selain itu manfaat perencanaan secara luas adalah sebagai berikut :²⁵

- 1) Memahami tujuan yang ingin dicapai dan cara mencapainya.
- 2) Memahami jenis dan struktur organisasi yang dibutuhkan.

²⁵ La Ode Kamalia, Perencanaa Dan Evaluasi Kesehatan (Jawa Barat: CV Media Sains Indonesia, 2021). 4-5.

- 3) Mengetahui jenis dan jumlah staf yang diinginkan dan uraian tugasnya
- 4) Memahami sejauh mana efektivitas kepemimpinan dan pengarahan yang diperlukan.
- 5) Mengetahui bentuk dan standar pengawasan yang akan dilakukan.
- 6) Dapat menyebabkan berbagai macam aktivitas organisasi untuk mencapai tujuan tertentu dan dapat dilakukan secara teratur.
- 7) Mengurangi atau menghilangkan jenis pekerjaan yang tidak produktif.
- 8) Dapat diciptakan standar untuk mengukur hasil kegiatan yang telah dicapai karena perencanaan ditetapkan berbagai standar.
- 9) Memberikan landasan pokok fungsi manajemen lainnya terutama fungsi pengawasan.

c. Efektivitas Proses Perencanaan

Dalam hal ini setidaknya ada 4 (empat) hal yang bisa menjamin bahwa proses perencanaan dapat mencapai efektivitas, antara lain yaitu :²⁶

- a) Proses perencanaan yang didesain secara baik, yang berarti mempunyai kejelasan, dapat diukur pencapaiannya, bersifat fleksibel serta bisa disesuaikan guna merespons kondisi perencanaan yang kemungkinan berubah (tidak kaku)
- b) Memperoleh dukungan dari manajemen puncak, dimanah berupa perhatian yang jelas serta berkelanjutan.
- c) Perencanaan yang berfokus pada implementasi. Sebuah rencana hanya akan efektif apabila implementasinya membantu mencapai tujuan organisasi.

²⁶ Joko Sabtohadji, Manajemen, (Jawa Barat: Penerbit Widina, 2022), 93.

Oleh sebab itu setiap perencana harus dapat memberikan hasil akhir berupa tindakan yang berdasar pada sasaran-sasaran yang diinginkan.

- d) Memilih orang-orang yang tepat. Dalam merencanakan sesuatu, ada baiknya mengikut sertakan para manajer dalam bidang fungsional dalam bidang organisasi sehingga mendapatkan informasi yang akurat dan relevan. Orang-orang yang tepat bisa memberikan masukan dan umpan balik yang bagus dalam proses perencanaan dan dalam implementasi rencana

3. Pengevaluasian

Evaluasi adalah merupakan proses yang menentukan kondisi, dimanah suatu tujuan telah dapat dicapai.²⁷ Evaluasi sama pentingnya dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya, yaitu perencanaan, pengorganisasian atau pelaksanaan, pemantauan (*monitoring*) dan pengendalian. Terkadang fungsi monitoring dan fungsi evaluasi, sulit untuk dipisahkan. Penyusunan sistem dalam organisasi dan pembagian tugas, fungsi serta pembagian peran pihak-pihak dalam organisasi, ada kalanya tidak perlu dipisah-pisah secara nyata. Fungsi manajemen puncak misalnya, meliputi semua fungsi dari perencanaan sampai pengendalian. Oleh karena itu, evaluasi sering dilakukan oleh pimpinan organisasi dalam suatu rapat kerja, rapat pimpinan, atau temu muka, baik secara reguler maupun dalam menghadapi kejadian-kejadian khusus lainnya.²⁸

²⁷ Nur Gamar, *Evaluasi Pembelajaran Daring*, (Gorontalo: Penerbit NEM, 2022), 10.

²⁸ Budiharjo, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2019). 9.

Dalam melakukan suatu kegiatan, dalam rangka mencapai tujuan diperlukan adanya evaluasi untuk meningkatkan kapasitas program atau kegiatan yang berjalan. Evaluasi merupakan proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk mengumpulkan, mendeskripsikan, menginterpretasikan dan menyajikan informasi untuk dapat digunakan sebagai dasar membuat Keputusan, menyusun kebijakan maupun program selanjutnya. Dalam melaksanakan evaluasi dengan baik, ada beberapa kriteria evaluasi yang dapat dijadikan patokan, yaitu sebagai berikut :

- 1) Evaluasi adalah proses bukan suatu hasil (produk). Hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi adalah kualitas sesuatu, baik yang menyangkut tentang nilai atau arti, sedangkan kegiatan untuk sampai pada pemberian nilai dan arti itu adalah evaluasi.
- 2) Tujuan evaluasi adalah untuk menentukan kualitas sesuatu, terutama yang berkenaan dengan nilai dan arti.
- 3) Dalam proses evaluasi harus ada pemberian pertimbangan (judgement) yang merupakan konsep dasar dari evaluasi. Melalui pertimbangan inilah ditentukan nilai dan arti/makna dari sesuatu yang di evaluasi.
- 4) Pemberian pertimbangan tentang nilai dan arti haruslah berdasarkan kriteria tertentu. Tanpa kriteria yang jelas pertimbangan nilai dan arti yang diberikan bukanlah suatu proses yang dapat diklarifikasikan sebagai evaluasi.

Model evaluasi merupakan pengumpulan informasi mengenai suatu program yang berguna sebagai bahan pengambilan Keputusan dan melihat apakah

program sudah berjalan dengan baik atau belum. Model evaluasi Formatif dan Sumatif yaitu :²⁹

- 1) Evaluasi formatif merupakan evaluasi yang dilaksanakan ketika program masih berjalan. Evaluasi formatif adalah untuk mengadakan perbaikan pada program sedang berjalan. Tujuan dari evaluasi formatif yaitu untuk mengetahui sejauh mana program yang dirancang dapat berlangsung, sekaligus mengidentifikasi hambatan-hambatan yang terjadi.
- 2) Evaluasi sumatif dilakukan setelah program berakhir. Evaluasi ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar tujuan akhir program tercapai sehingga bisa diketahui ketercapaian program yang telah dilaksanakan, evaluasi dilaksanakan pada akhir sebuah program. Tujuan dari evaluasi ini adalah mengukur ketercapaian program.³⁰

Dari berbagai teori evaluasi di atas maka dapat saya simpulkan evaluasi adalah proses pengukuran dan menilai dari hasil dari kebijakan yang dibuat apakah sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan yang telah dirancangan sehingga dapat di ketahui pengukurannya.

Indikator dalam efektivitas pengevaluasian diantaranya :³¹

- a) Sistematis
- b) Terarah

²⁹ Sulastri Sardjo, Linda Darmajanti, "Implementasi Model Evaluasi Formatif Program Pembangunan Sosial (EFPPS)", (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020), 3.

³⁰ Ferdinan, Evaluasi Program Pendidikan Islam (Sumatra Barat: Insan Cendekia Mandiri, 2022). 4.

³¹ Sutrisno, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Perencanaan Dan Penganggaran", Jurnal Refitalisasi No. 01 (Tulung Agung : 2018). 113.

- c) Terpadu
- d) Menyeluruh
- e) Tanggap terhadap perubahan

4. Dana Desa

a. Definisi Desa

Secara umum istilah desa atau pedesaan berasal dari bahasa Sangsekerta yang secara denotatif desa berarti organisasi yang mandiri atau suatu kawasan pemukiman yang mengatur dirinya sendiri. Sedangkan desa secara konotatif mengandung arti sebagai wilayah jajahan atau dalam arti keberadaan desa tidak terlepas dari organisasi yang lebih tinggi yakni Negara, Baik pada bentuk Negara modern kerajaan atau Negara Tradisional, secara politis, desa berada di bawah kontrol kekuasaan Negara sebagai organisasi tertinggi. Disamping itu, desa sendiri bukan kawasan yang tertutup dari dunia luar melainkan kawasan terbuka yang senantiasa menjalin interaksi dengan kota dalam bentuk pertukaran arus barang dan jasa. Kendati ini desa mendapat pengaruh dari luar, namun relatif tidak menghilangkan karakteristik desa, desa tetap merupakan suatu kawasan yang memiliki kelembagaan (ekonomi, politik, agama, seni dan kekerabatan) yang khas dan mandiri sebagai hasil dari proses evolusi sosial dan budaya yang cukup lama ratusan, bahkan ribuan tahun yang lalu.³²

³² Sidik Permana, *Antropologi Perdesaaan Dan Pembangunan Berkelanjutan* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019).8.

Keberadaan desa sebagai suatu organisasi sosial sebenarnya telah lama muncul sebelum terbentuknya Negara modern yang kita kenal sekarang ini. Desa sebagai suatu tipe masyarakat kompleks muncul bersamaan dengan terbentuknya Negara tradisional atau kerajaan. Keberadaan desa sendiri tidak serta merta terbentuknya begitu saja, namun melewati tahapan evaluasi masyarakat yang cukup panjang. Proses evolusi organisasi masyarakat sendiri tidak terlepas dari pengaruh faktor lingkungan, pertumbuhan penduduk dan penemuan teknologi.³³

Dapat dilihat secara khusus terdapat berbagai definisi mengenai desa baik yang di kemukakan oleh undang-undang, dan para ahli pedesaan serta ahli teknologi diantaranya yaitu:

- 1) Pasal 1 peraturan pemerintah No. 76 tahun 2001 bahwa desa merupakan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul istiadat.
- 2) UU No. 6 Tahun 2014 bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan republik Indonesia.
- 3) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), desa (kata benda) adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem

³³ Nibra Nailufar, *Pengelolaan Dana Desa* (Yogyakarta: CV Media Sains Indonesia, 2020).15.

pemerintahan sendiri (di kepalai oleh seorang kepala desa) atau kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.

- 4) Bambang Utoyo, desa merupakan tempat sebagai besar penduduk yang bermata pencaharian dibidang pertanian dan penghasilan bahan makanan.
- 5) Otto Soemarwoto, desa sebagai suatu ekosistem Pada dasarnya terdiri dari tiga sub sistem yaitu, pemukiman atau tempat tinggal penduduk, lahan pertanian dan hutan. Ketiga sub sistem tersebut saling berhubungan satu sama lain terhubung oleh arus materi, energi dan terkendali oleh informan membentuk ekosistem desa yang diatur.

Berdasarkan pembahasan itu, dengan memahami desa sebagai suatu kawasan yang telah memiliki karakteristik dan kelembagaan yang sudah khas dan mandiri, sangat penting bagi kita untuk memahami evolusi keorganisasian masyarakat dimulai dari organisasi yang sederhana hingga organisasi yang berbentuk kompleks yang telah kita temukan dewasa ini. Penjelasan yang dimuat dalam peraturan pemerintah No. 43 Tahun 2014 yang dimaksud pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa menjadi garda terdepan dalam menggapai penghasilan dari segala urusan dan program dari pemerintah. Hal ini sejalan apabila dikaitkan dengan komposisi penduduk Indonesia menurut sensus terakhir pada tahun 2010 bahwa sekitar 50,21% atau sebagian besar penduduk Indonesia saat ini masih bertempat tinggal di kawasan pemukiman pedesaan (BPD 2015). Maka menjadi sangat logis apabila pembangunan desa menjadi prioritas utama bagi kesuksesan pembangunan

nasional. Agar dapat melaksanakan perannya dalam mengatur dan mengurus komunitasnya, desa berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah No. 72 Tahun 2015 tentang desa, diberikan kewenangan yang mencakup:

- 1) Urusan pemerintah yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa.
- 2) Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa.
- 3) Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Dan
- 4) Urusan pemerintahan lainnya yang peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Sumber pembiayaan pemerintah daerah terdiri dari 3 komponen besar, yaitu: pendapatan asli daerah, yang meliputi; hasil pajak daerah, hasil distribusi daerah, hasil perusahaan daerah (BUMD), lain-lain hasil usaha daerah yang sah, pendapatan yang berasal dari pasar, meliputi: sumbangan dari pemerintah, sumbangan-sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundang-undangan pendapatan daerah yang sah. Diantara ketiga komponen tersebut, komponen kedua yaitu pendapatan yang berasal dari pusat merupakan cerminan atau indikator dari ketergantungan pandangan pemerintah daerah terhadap pemerintah daerah.

b. Pengertian Dana Desa

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang cara pengelolaan, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi Dana Desa. Untuk kebijakan pemerintah yaitu pembangunan daerah, pemberdayaan masyarakat, serta pembinaan maka pemerintah memberikan biaya pada proses kebijakan tersebut.

salah satunya adalah dana desa yang dianggarkan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang berasal dari APBN yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.³⁴

Tujuan dari pemberian dana desa yaitu untuk mementaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, tingkat pelayanan publik di desa, menanggulangi kesenjangan pembangunan antar desa, dan memperkuat warga desa selaku subjek dari pembangunan.

Dalam rangka terselenggaranya pengelolaan dana desa yang tertib, transparan, akuntabilitas, serta bermutu, pemerintah serta kabupaten/kota diberikan kewenangan untuk menggunakan sanksi berbentuk penundaan penyaluran dana desa dalam perihal pemakaian dana desa tidak dilaporkan/terlambat. Tidak hanya itu, pemerintah serta kabupaten/kota pula bisa menggunakan sanksi berbentuk pengurangan dana desa apabila pemakaian dana tersebut tidak cocok dengan prioritas pemakaian dana desa, pedoman universal, pedoman teknis kegiatan, ataupun terjadi penyelewengan dana berbentuk deposito dari 2 bulan. Anggaran dana desa ditetapkan sebesar 10% dari total dana transfer ke wilayah, dana akan diberikan secara bertahap sesuai dengan APBN.

c. Dasar hukum dana desa

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang desa
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa bersumber dari APBN

³⁴ Theresia Wea Setia Budi Kurniawan, Akutaqnbilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Malang: Media Nusa Creativ, 2021).77.

- 3) Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan
- 4) Peraturan Menteri Desa Nomor 5 tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2015
- 5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 tahun 2016 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan Evaluasi dana desa
- 6) Peraturan Pemerintah Dalam Negeri 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Desa

d. Tujuan dana desa

Diharapkan dengan terdapatnya dana desa, kesejahteraan warga desa bertambah. Sebagaimana tujuan dana desa dalam PP Nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa, ialah sebagai berikut:³⁵

- 1) Mengentaskan kemiskinan
- 2) Memajukan perekonomian desa
- 3) Meningkatkan pelayanan publik di desa
- 4) Menanggulangi kesenjangan pembangunan antar desa
- 5) Menkuatkan warga desa selaku subjek dari pembangunan.

e. Alokasi Dana Desa

Undang-undang No. 6 tahun 2014 pasal 72 ayat 1 (d) dan ayat 4 tentang desa menyatakan pemerintah mengamanatkan bahwa sumber pendapatan desa

³⁵ Nelly Masnilah, Akutansi Keuangan Pemerintah Desa (Sumatera Barat: Cv Mitra Cendikia, 2021). 213.

berasal dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10 persen setelah dikurangi dana alokasi khusus.³⁶Dibagi untuk setiap desa secara proporsional merupakan alokasi dana desa. Sedangkan pengelolaan Anggaran Dana Desa diatur dalam peraturan menteri dalam negeri No. 43 tahun 2014 pedoman pengelolaan keuangan desa pasal 92 ayat 2 alokasi dana desa berasal dari APBD kabupaten/kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10 persen. Pengelolaan Anggaran Dana Desa mengacu pada asas:³⁷

- 1) Asas merata adalah pembagian alokasi dana desa sesuai dan sama.
- 2) Asas adil adalah pembagian alokasi dana desa yang dihitung menggunakan rumus tertentu, seperti kemiskinan pendidikan, kesehatan, jumlah penduduk, dan potensi ekonomi yang merupakan alokasi dana desa proporsional. Persentase perbandingan asas merata dengan adil adalah besarnya ADDM yaitu 69% dari jumlah ADD dan besarnya ADDP yaitu 40% berdasarkan jumlah ADD.

f. Pembangunan desa

Pemerintah Indonesia sangat memperhatikan pembangunan tiap daerah maupun desa yang merupakan tujuan utama nasional. Pembangunan desa merupakan meningkatkan suatu desa dengan membangun baik itu pembangunan

³⁶ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia “Lembaga Pemerintahan”, 11 Maret 2020, <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/33.pdf>

³⁷ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia “Lembaga Pemerintahan”, 11 Maret 2020, <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/33.pdf>

fisik maupun nonfisik sehingga masyarakat dapat hidup sejahtera. Perkembangan atau kemajuan suatu desa dilihat dari perkembangan pembangunannya.³⁸

Pembangunan pedesaan memberi arti penting dalam usaha untuk mengurangi berbagai kesenjangan pendapatan, kesenjangan kaya dan miskin, kesenjangan desa dan kota. Pada Saat ini perekonomian daerah yang semakin terbuka dan lebih demokratis menjadi tantangan bagi desa dalam hal pembangunan desa, dan sesuai dengan rencana strategi dan kebijakan pembangunan di Indonesia yang menjadikan pembangunan pedesaan sebagai prioritas utama.

Kemajuan suatu daerah ditentukan oleh masyarakatnya sebagai penggerak dalam membangun daerahnya yang merupakan hakikat pembangunan nasional, masyarakat sebagai fungsi pelaksana yang merupakan faktor yang sangat penting dalam menyusun struktur suatu kegiatan pembangunan. Desa akan pesat perkembangannya apabila masyarakat bersatu dalam melaksanakan tugas pembangunan daerahnya.

Pembangunan desa adalah tujuan untuk menyejahterakan masyarakat yang merupakan kebijakan dari pemerintah dengan memberi sarana dan prasarana untuk menjalankan proses pelaksanaan pembangunan.

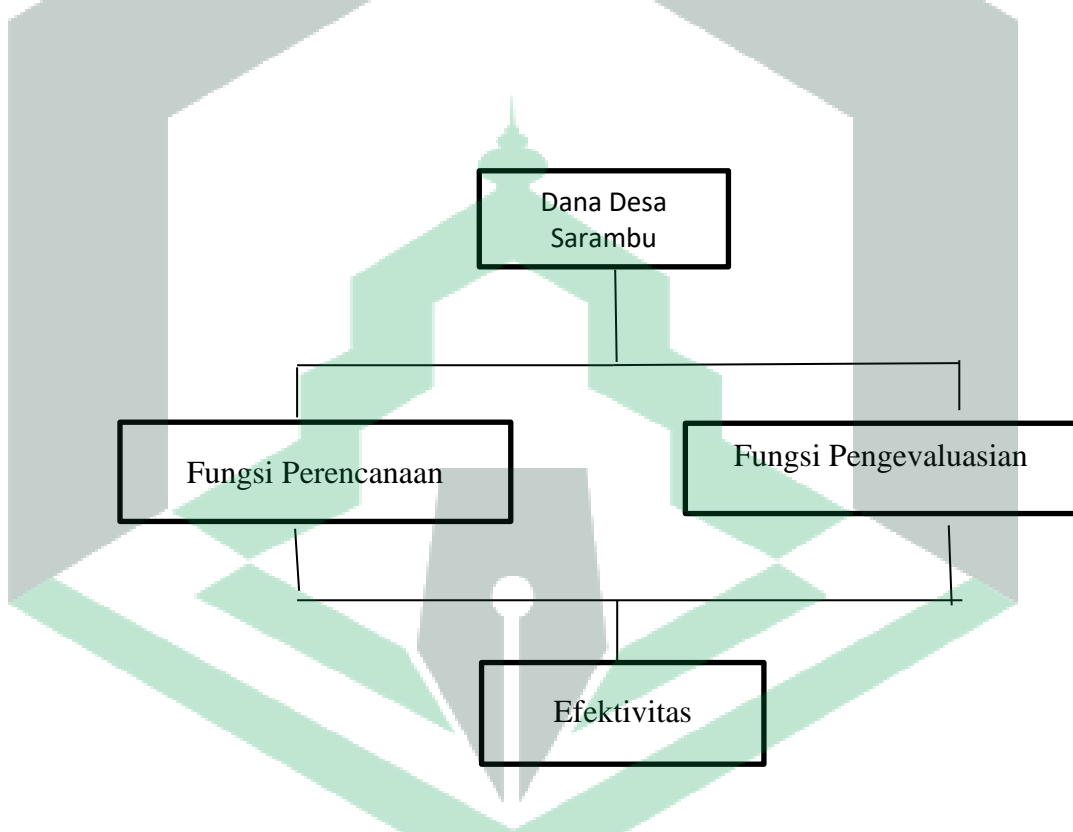
C. Kerangka Pikir

Kerangka Pikir adalah bentuk abstrak mengenai teori berkaitan dengan berbagai aspek yang sudah diidentifikasi sebagai permasalahan yang penting.

³⁸ Arna Suryani. "Manajemen Pengelolaan Dana Desa."(Jurnal Manajemen dan sains) 2019. 349.

Kerangka pikir yang baik akan menerangkan secara teoritis hubungan antar variabel yang akan diteliti.

Objek dari riset atau penelitian ini adalah dana desa di desa srambu kecamatan porehu kabupaten kolaka utara. Spesifikasi dalam riset ini ialah menganalisis fungsi perencanaan dan pengevaluasian dana desa. Bersumber pada beberapa teori, hingga dapat diungkapkan suatu kerangka berpikir yang berperan sebagai penuntun, alur berpikir sebagai dasar dalam penelitian ini:



Gambar 2.1 Skema Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Pada Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan menghasilkan data deskriptif karena bermaksud untuk mendalami dan menghayati suatu objek.

Metode penelitian kualitatif merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengungkapkan suatu keadaan maupun suatu objek dalam konteksnya, menemukan makna (*meaning*) atau pemahaman yang mendalam tentang suatu masalah yang sedang di hadapi baik berupa gambar, kata dan kejadian.³⁹ Untuk penelitian efektivitas menggunakan metode kualitatif dengan alat pengumpulan data, observasi, wawancara dan dokumentasi.⁴⁰

B. Tempat dan Waktu Penelitian

a. Tempat Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan di Desa Sarambu Kecamatan Porehu Kabupaten Kolaka Utara.

b. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian dilakukan selama kurang lebih 2 bulan.

³⁹ A Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan (Jakarta: Kencana, 2017). 33.

⁴⁰ Mukhdis, Pendekatan Kuantitatif Dalam Penelitian Pendidikan (Malang: Media Nusa Creatif). 181

C. Subjek/Informan Penelitian

Adapun pada penelitian ini menggunakan *metode nonprobability* sampling dengan menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan adanya pertimbangan tertentu.⁴¹ Sehingga *purposive sampling* yaitu cara mengambil sampel dengan secara sengaja yang telah sesuai dan memenuhi segala persyaratan yang dibutuhkan yang meliputi: sifat, karakteristik, ciri dan kriteria sampel tertentu .

Teknik pengambilan *purposive sampling* yang pertama yaitu Kepala Desa, BPD sebanyak 1 orang, sekretaris desa dan masyarakat desa sebanyak 1 orang.

D. Definisi Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam memahami maksud dari judul penelitian ini, maka penulis perlu untuk menjelaskan secara rinci indikator-indikator dan poin-poin penting yang terdapat pada judul penelitian. Adapun Definisi Istilah yang terdapat dalam penulisan ini ialah sebagai berikut:

a. Efektivitas

Secara etimologi kata efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti dicapainya tujuan yang telah ditetapkan dalam bahasa *Inggris effectiveness* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Efektivitas adalah daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju dari hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.

⁴¹ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2013). 85.

b. Fungsi Perencanaan

Pada dasarnya fungsi perencanaan adalah untuk membantu proses pengambilan keputusan terbaik yang sesuai dengan tujuan organisasi. Pada pelaksanaannya, proses perencanaan yang dilakukan harus menjawab pertanyaan 5W + 1H, yaitu:

- 1) *What*: Apa tujuan yang ingin dicapai organisasi?
- 2) *Why*: Mengapa hal tersebut menjadi tujuan organisasi?
- 3) *Where*: Dimanah lokasi yang paling tepat untuk mencapai tujuan tersebut?
- 4) *When*: Kapan pekerjaan harus diselesaikan agar tujuan tercapai (berhubungan dengan jadwal)?
- 5) *Who*: Siapa orang-orang yang tepat yang harus dipilih untuk melaksanakan pekerjaan sehubungan dengan tujuan organisasi?
- 6) *How*: Bagaimana metode atau cara melaksanakan pekerjaan dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.

c. Pengevaluasian

Pengevaluasian adalah proses pengukuran dan menilai dari hasil dari kebijakan yang dibuat apakah sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan sehingga dapat di ketahui pengukurannya.

d. Dana desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi yang ditransfer melalui APBD kabupaten dan kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembiayaan kemasyarakatan. Dana desa adalah salah satu kebijakan pemerintah

yang penggunaannya diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/ bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja masyarakat setempat. Penyelenggaraan pemerintahan desa membutuhkan pembinaan dan pengawasan, khususnya penyelenggaraan kegiatan desa.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik analisis data ialah suatu proses menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan dengan kategori yang sama, sehingga memudahkan seseorang dalam memahami.

a. Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian yang dilakukan secara sistematis, dalam hal ini peneliti terlebih dahulu merencanakan hal-hal apa saja yang akan diamati. Nantinya peneliti akan terjun langsung kelapangan untuk melakukan observasi dan melakukan wawancara kepada setiap mereka yang dapat memberikan informasi terkait data perencanaan dana desa, pembangunan desa, data pengelolaan dana desa yang dibutuhkan peneliti dijadikan sumber data yang nantinya peneliti masukkan ke dalam laporan penelitian.

b. Wawancara

Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan melalui interviu secara langsung dengan informan. Teknik ini akan menguatkan pedoman wawancara agar

wawancara yang dilakukan tetap berada pada fokus penelitian. Peneliti akan mengajukan pertanyaan kepada orang-orang yang dianggap mewakili masyarakat desa seperti Kepala Desa, Kepala Dusun, Tokoh Masyarakat. Informasi yang didapatkan dari narasumber berupa data pengelolaan dana desa dan perencanaan pembangunan desa.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini akan dilakukan telaah pustaka, dimanah peneliti mengumpulkan data dari peneliti sebelumnya berupa buku dan jurnal. Metode dokumentasi ini merupakan metode pengumpulan data yang berasal dari sumber non-manusia. Dokumen dan arsip berkaitan dengan fokus penelitian merupakan salah satu sumber data yang paling penting dalam penelitian. Dokumen yang di maksud adalah dokumen tertulis, gambar/foto, atau film audio-visual, data statistik, laporan penelitian sebelumnya maupun tulisan-tulisan ilmiah.

F. Teknik Pengabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data dilakukan untuk membuktikan suatu penelitian untuk menguji data yang telah diperoleh. Pada penelitian ini dalam pemeriksaan keabsahan data maka peneliti menggunakan Triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Dengan kata lain apabila peneliti menggunakan triangulasi maka peneliti sedang menguji kredibilitas data. Adapun triangulasi yang digunakan ialah :⁴²

⁴² Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, (Bandung: ALFABETA, 2013). 241

- a. Triangulasi merupakan teknik pengambilan data yang dilakukan dengan cara mengecek ulang dan koreccek dengan subjek lain. Triangulasi adalah teknik pengambilan data dengan pemanfaatan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.⁴³
- b. Triangulasi sumber adalah triangulasi bertujuan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek informasi data yang diperoleh melalui wawancara dengan informan. Kemudian data tersebut ditanyakan kepada informan lain yang masih terkait satu sama lain. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek informasi/data yang diperoleh melalui wawancara dengan informan. Kemudian data tersebut di tanyakan kepada informan lain yang masih terkait satu sama lain.⁴⁴
- c. Triangulasi waktu pengecekan dapat dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi atau teknik lain dalam waktu yang berbeda atau dalam kurun waktu tertentu. Triangulasi waktu ini penting dilakukan guna melihat konsistensi data penelitian apalagi bila data tersebut berupa pendapat atau komentar dari informan yang sangat mungkin berubah karena informan juga makhluk sosial.⁴⁵

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data ialah suatu proses menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan

⁴³ Nasihudin, Rusdiana, Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Tinggi (Bandung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan, 2016). 60.

⁴⁴ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif (Bandung:Alfabeta,2013). 302.

⁴⁵ Sigit Hermawan, Amirullah, “ Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif” (Malang: Media Nusa Creative) 2016

cara mengorganisasikan dengan kategori yang sama, sehingga memudahkan seseorang dalam memahami. Adapun teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini ialah teknik analisis model interaktif, berikut tahapan-tahapannya^{.46}

a. Reduksi Data

Pada proses ini, penelitian menyempurnakan data dengan melakukan pengurangan data yang tidak penting atau relevan ataupun pengurangan data yang tidak penting atau relevan ataupun menambahkan data yang dianggap masih kurang sehingga memudahkan dalam menyimpulkan data hasil penelitian. Dengan cara memilih dan menyeleksi setiap data yang masuk dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian mengolah dan memfokuskan semua data mentah agar lebih bermakna.

b. Penyajian Data

Setelah melakukan pengurangan data yang kurang relevan, maka selanjutnya peneliti akan melakukan penyajian data yaitu dengan menyusun informasi yang didapatkan dengan sistematis dan rapi, yang bertujuan untuk menyajikan data kualitatif yang valid. Penyajian data pada penelitian ini dapat dilakukan dengan membuat uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori dan lainnya.

⁴⁶ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, (Bandung: ALFABETA, 2013). 244.

c. Kesimpulan dan Verifikasi

Setelah melakukan pengajian data, maka langkah selanjutnya yang dilakukan ialah dengan menarik kesimpulan yang menjadi titik tumpu dari hasil atas rumusan masalah yang telah di rumuskan di awal.

H. Data dan Sumber Data

Pada dasarnya suatu penelitian memiliki tujuan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi. Untuk mengukur keakuratan suatu data maka penulis menggunakan jenis data berupa data primer dan data sekunder, yaitu:⁴⁷

a. Data Primer

Data primer merupakan suatu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau dari sumber aslinya, baik melalui observasi maupun dengan melakukan wawancara secara langsung kepada responden dan informan yang terkait. Data primer yang di butuhkan adalah tanggapan pemerintah desa dan masyarakat tentang penyelenggaraan otonomi desa selama ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber kedua atau data yang telah di kumpulkan oleh lembaga atau badan. Data sekunder pada penelitian ini didapatkan dari hasil yang diperoleh dari data-data tentang rincisan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah desa dan kewenangan lainnya yang telah ada pada desa, data-data tentang keadaan umum lokasi penelitian mencakup keadaan geografis dan demografis.

⁴⁷ Samsu, Metode Penelitian: Teori Dan Aplikasi Penelitian Kuantitatif, Mixed Method, Serta Research Dan Development, (Jambi :2017). 94-95.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi penelitian

1. Sejarah Desa Sarambu

Desa sarambu merupakan salah satu desa dari 8 desa di kecamatan porehu kabupaten kolaka utara. Yang berdiri sejak tahun 2006. Desa ini mempunyai jarak 4 Km dari Ibukota Kecamatan Porehu yakni Desa Bangsala. Serupa dengan kebanyakan desa di wilayah Kecamatan Porehu, Desa Sarambu merupakan salah satu wilayah perdesaan yang memiliki karakter biografi yakni berada diatas daratan tinggi +- 500m diatas permukaan laut.

Sebelum berdiri menjadi desa, awalnya Desa Sarambu Hanya merupakan sebuah dusun dan masih menjadi bagian Desa Ponggi. Namun seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat pada tahun 2006 dusun 4 (Kampung Baru) Desa Ponggi di mekarkan menjadi Desa Sarambu dengan pembagian wilayah menjadi 5 dusun.

Akhirnya pada tahun 2006 diangkatlah pejabat Kepala Desa yang saat itu diamanahkan kepada Bapak HALIM TANDI AYU. Namun tahun berikutnya, yakni tahun 2007 pejabat Kepala Desa digantikan oleh bapak Nurdin. Mengingat belum adanya Kepala Desa Definitif, maka Masyarakat mengusulkan kepala desa.

Melihat besarnya aspirasi masyarakat, akhirnya Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara merekomendasikan kepada Pejabat Kepala Desa kala itu untuk mempersiapkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa untuk pertama kalinya sejak dimekarkan.

Pada tahun 2008 dilaksanakanlah pemilihan Kepala Desa definitif yang diikuti oleh 3 calon Kepala Desa, dan yang terpilih yaitu Bapak Halim Tandi Ayu sebagai peraih suara terbanyak pada. Pada tahun yang sama kades terpilih tersebut dilantik sebagai Kepala Desa definitif pertama Desa Sarambu dengan masa jabatan hingga tahun 2014.

Karena masa jabatan Halim Tandi Ayu berakhir, maka pada bulan Maret tahun 2014 kembali diangkat pejabat sementara Kepala Desa Sarambu yaitu Ibu Hamna, S.P hingga bulan Maret 2015. Dan pada bulan yang sama digantikan oleh pejabat Kepala Desa dari ASN yaitu Bapak Halim Tandi Ayu sampai bulan April tahun 2017, dan digantikan pada bulan yang sama yaitu Ibu Mastia, A.Md. Keb. Sampai bulan Juni tahun 2017. Dan pada bulan Mei, dilaksanakanlah pemilihan Kepala Desa Definitif se Kolaka Utara dan untuk yang kedua kalinya di Desa Sarambu yang diikuti oleh dua calon yakni Bapak Halim Tandi Ayu dan Bapak Arwing, S.Kom. dan yang terpilih berdasarkan peraih suara terbanyak kala itu yakni Bapak Arwing S.kom dan pada tanggal 10 bulan Juni Tahun 2017 Dilantiklah kepala desa yang terpilih. Selanjutnya di tahun 2023 pada bulan April dilaksanakan pemilihan Kepala Deza Definitif Se Kolaka Utara dan untuk yang ketiga kalinya di Desa Sarambu yang diikuti oleh dua calon yakni

Bapak Halim Tandi Ayu dan Bapak Arwing, S.Kom. dan yang terpilih berdasarkan peraih suara terbanyak saat itu yakni Bapak Arwing S.kom dan pada tanggal 13 bulan Juni Tahun 2023 Dilantiklah kepala desa yang terpilih.

2. Letak Geografis dan Topografi

Desa Sarambu berada di kecamatan Porehu kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara. Kecamatan Porehu merupakan salah satu kecamatan di Kolaka Utara yang berada di atas pegunungan atau biasa disebut dengan dataran tinggi yang berada dibagikan utara kabupaten Kolaka Utara yang melintang dari utara ke selatan pada titik koordinat $2^{\circ}55'0''$ LS – $3^{\circ}5'0''$ dan membujur dari barat ke timur antara koordinat $121^{\circ}25'0''$ BT. Luas kecamatan Porehu mencakup wilayah daratan dengan luas daratan $647,3$ Km² dengan ketinggian ± 600 Meter dari permukaan laut.

Kecamatan Porehu merupakan kecamatan yang memiliki 8 (delapan) desa yaitu Desa To 'bela, Porehu, Bangsala, Ponggi, Sarambu, Larui, Tanggaruru, dan Desa Tinuna. Desa yang menjadi tempat penelitian ini yaitu Desa Sarambu dengan luas wilayah desa sekitar ± 100 Ha² dan desa ini berjarak 112 Km dari ibu kota kabupaten Kolaka Utara. Secara geografi Desa Sarambu terletak disebalah utara ibu kota Kabupaten Kolaka Utara dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Larui
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Ponggi
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Porehu

- d. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Larui.

Berdasarkan topografi Desa Sarambu secara umum merupakan daerah daratan tinggi sehingga memiliki iklim yang cukup dingin karena tingginya konsentrasi udara basah di daerah ini sehingga kondisi iklim membuat wilayah ini sedikit berbeda dengan wilayah lain di Kabupaten Kolaka Utara.

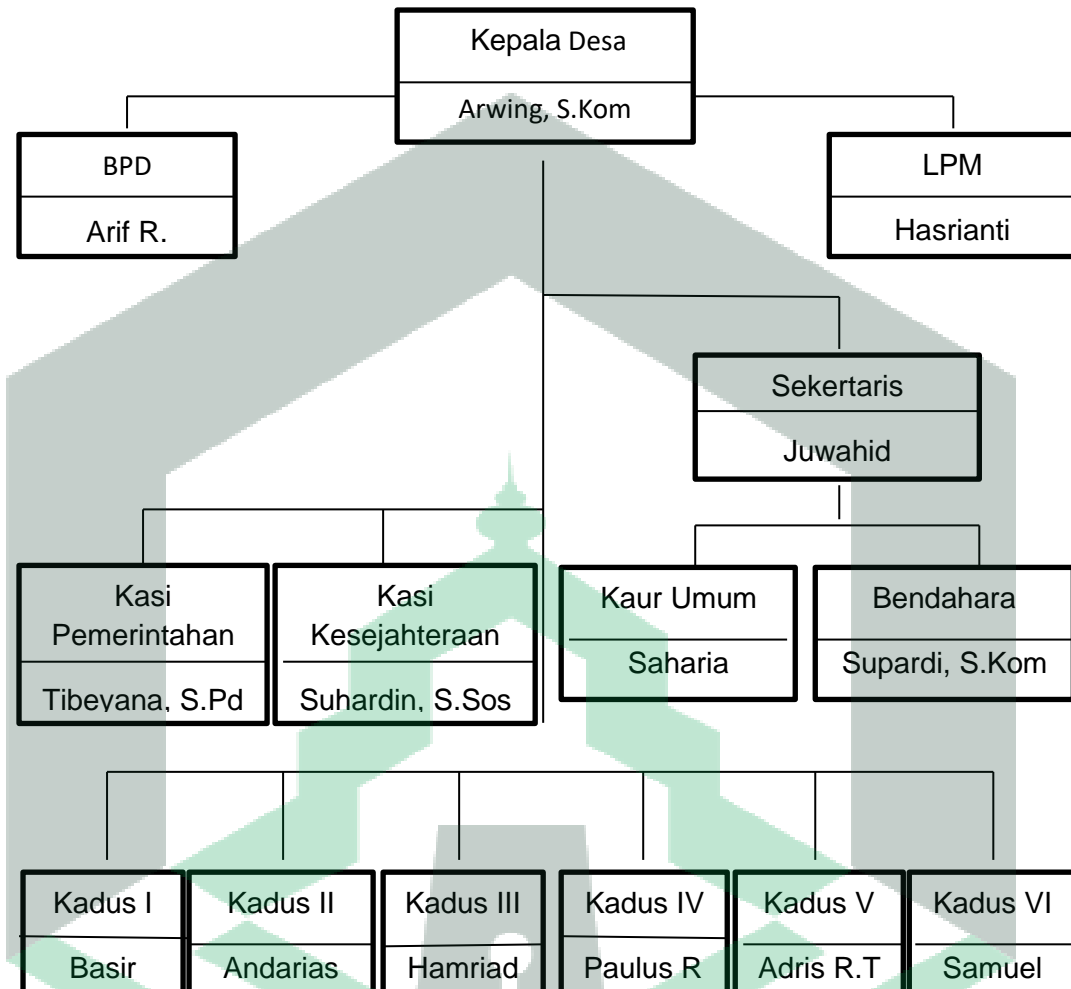
Keadaan musim di daerah ini sama dengan daerah lain di Indonesia pada umumnya yaitu memiliki 2 (dua) musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim kemarau biasanya terjadi antara bulan September sampai bulan November sedangkan musim hujan biasanya terjadi pada pertengahan bulan Desember sampai dengan bulan Februari bahkan kadang sampai bulan Maret.

3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi pemerintahan desa terdiri dari beberapa tingkatan yang setiap tingkatannya memiliki porsinya sendiri. Pemerintah desa bertugas untuk mengatur masyarakat setempat demi mewujudkan pembangunan pemerintahan di desa. Berikut susunan organisasi Pemerintahan Desa Sarambu Kecamatan Porehu Kabupaten Kolaka Utara.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Sarambu Kecamatan

Porehu Kabupaten Kolaka Utara



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sarambu

Tugas dan fungsi struktur organisasi desa

a. Kepala Desa

Kepala Desa bertugas untuk menyelenggarakan pemerintah dan pemberdayaan desa berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan bersama BPD.

b. Badan Pemerintahan Desa (BPD)

Badan Pemerintahan Desa adalah lembaga yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa yang di tetapkan secara demokratis berdasarkan

kewilayahan. Fungsi dari BPD adalah membahas dan menyetujui rencana peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat, dan mengawasi kinerja kepala desa.

c. LPM Desa

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah lembaga mitra strategis di luar pemerintahan desa yang membantu dalam meningkatkan partisipasi dan pelayanan penyelenggaraan masyarakat desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah dalam Negeri No. 18 tahun 2018 pasal 4 dan 5, LPM Desa memiliki tugas untuk: 1. Melakukan pemberdayaan masyarakat desa; 2. Ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; 3. Meningkatkan pelayanan masyarakat desa.

d. Sekretaris Desa

Sekretaris desa adalah perangkat yang membantu kepala desa menjalankan tugasnya. Fungsi sekretaris yaitu menyiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, membantu persiapan penyusunan peraturan desa dan bahan untuk laporan penyelenggara pemerintah desa serta melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala desa.

e. Kaur Umum

Kaur Umum bertugas untuk membantu sekretaris dalam mengelola arsip desa, dan administrasi umum, juga sebagai penyedia, pemelihara dan perbaikan peralatan kantor. Serta pelaksana tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa.

f. Kasi Pemerintahan

Kasi Pemerintahan bertugas untuk membantu kepala desa dalam mengelola administrasi dan perumusan bahan kebijakan desa dan berfungsi melaksanakan

kegiatan berkaitan dengan kependudukan, pertahanan, pembinaan ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

g. Kasi Kesejahteraan

Kasi kesejahteraan bertugas membantu kepala desa mempersiapkan perumusan kebijakan teknis penyusunan program keagamaan dan melaksanakan program pemberdayaan dan sosial kemasyarakatan. Kasi kesejahteraan berfungsi melaksanakan hasil persiapan program keagamaan, pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan.

h. Kepala Dusun

Kepala dusun atau kadus bertugas untuk membantu kepala desa melaksanakan tugasnya di wilayah dusun. Kepala dusun atau kadus berfungsi membantu kinerja dan melaksanakan kegiatan yang diselenggarakan pemerintah desa di kawasan dusun dalam menyejahterakan masyarakat.

4. Demografis atau Kependudukan

Masyarakat desa Sarambu rata-rata berprofesi sebagai petani diantaranya sebagai petani nilam, kakao, lada, dan cengkeh. Hanya sekitar 5% yang berprofesi sebagai guru. Pendidikan masyarakat desa Sarambu hanya berkisar pada tamatan SD dan SMP bahkan banyak yang tidak tamat SD hanya beberapa persen tamatan SMA dan hanya sebagian kecil yang sarjana. Jumlah penduduk desa Sarambu saat ini adalah sebesar 839 jiwa dengan jumlah KK sebanyak 208 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Laporan Jumlah Penduduk Desa Sarambu Tahun 2020

No.	Dusun	Jumlah KK	Jumlah Penduduk			Jumlah Wajib KTP-E		
			Lk	Pr	Jumlah	Lk	Pr	Jumlah
1	Dusun I	55	116	115	231	85	79	164
2	Dusun II	48	120	107	227	86	69	155
3	Dusun III	34	70	52	122	45	34	79
4	Dusun IV	28	53	51	104	44	33	77
5	Dusun V	20	37	32	69	28	20	48
6	Dusun VI	23	49	37	68	35	21	56
	Jumlah	208	445	395	839	323	256	579

Sumber: Kantor Desa sarambu

5. Anggaran Pendapatan Transfer Desa

Tabel 4.2 Anggaran pendapatan Transfer Desa Sarambu Tahun 2019–2022

No.	Tahun	Uraian	Anggaran (Rp)
1	2019	Dana Desa	1.284.030.000
		Jumlah Pendapatan	1.752.694.395
2	2020	Dana Desa	1,293,067,045
		Jumlah Pendapatan	1,299,067,045
3	2021	Dana Desa	1,146,821,000
		Jumlah Pendapatan	1,615,171,000
4	2022	Dana Desa	1,284,030,000
		Jumlah Pendapatan	1,757,694,395

Sumber: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019-2022

B. Hasil Penelitian

1. Fungsi Perencanaan Dana Desa

a. Proses perencanaan yang di desain secara baik

Perencanaan dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan untuk menentukan strategi yang nantinya akan digunakan dalam mencapai tujuan yang diinginkan dengan mempertimbangkan keadaan di waktu yang akan datang guna mencapai tujuan yang diinginkan. Dimanah proses perencanaan dalam suatu pemerintah desa itu sangat memiliki pengaruh yang sangat signifikan karna dalam menyusun perencanaan pembangunan pada suatu desa itu harus sesuai dengan kewenangan desa itu sendiri dengan acuan perencanaan pada tingkat kabupaten kota.

Berikut hasil wawancara peneliti kepada Kepala Desa Sarambu yaitu Bapak Arwing mengenai tahapan Perencanaan pengelolaan ADD sebagai berikut :

“Tahapan pengelolaan ADD dimulai dengan menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Hasil musyawarah desa menjadi pedoman bagi kami selaku pemerintah desa menyusun rancangan RKP desa dan daftar usulan RKP Desa musyawarah desa paling lambat bulan Juni tahun berjalan”⁴⁸

Hasil wawancara peneliti kepada masyarakat yaitu Ibu Maryana :

“Tahapan pengelolaan ADD itu dilakukan setelah musyawarah bersama antara masyarakat dengan aparat desa, nah hasil musyawarah tersebut

⁴⁸ Arwing, Kepala Desa Sarambu”Wawancara”. Desa Sarambu Kecamatan Porehu, 5 April 2023

*kemudian di susun dan diatur mengenai pelaksanaannya oleh aparat desa.*⁴⁹

Hasil wawancara peneliti dengan sekretaris Desa Sarambu yaitu Bapak Juwahid

:

*“Agenda pokok musyawarah desa dalam menyusun rencana pembangunan yaitu yang pertama kami mencermati ulang dokumen RPJM desa lalu menyepakati hasil pencermatan ulang RPJM tersebut setelah itu membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan. Tim verifikasi ini berasal dari warga masyarakat kami sendiri.”*⁵⁰

Kemudian Masyarakat Desa Sarambu yaitu Ibu Tini juga mengatakan :

*“Agenda pokok musyawarah yang dilakukan adalah mengenai pembangunan apa saja yang akan dilakukan, di susun mulai dari yang di prioritaskan lalu kami selaku masyarakat dibentuk menjadi tim verifikasi.”*⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa proses perencanaan sudah di desa secara baik.

b. Memperoleh dukungan dari manajemen puncak

Memperoleh dukungan dari manajemen puncak, dimanah berupa perhatian yang jelas serta berkelanjutan. Berikut hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Sarambu yaitu Bapak Arwing sebagai berikut:

“Kami selaku pemerintah desa memiliki kewajiban untuk membina dan mengawasi setiap penyelenggaraan pemerintah desa khususnya

⁴⁹ Maryana, Masyarakat Desa Sarambu “wawancara” Desa Sarambu Kecamatan Porehu, 8 April 2023

⁵⁰ Juwahid, Sekertaris Desa Sarambu”Wawancara”. Desa Sarambu Kecamatan Porehu, 7 April 2023

⁵¹Tini , Masyarakat Desa Sarambu “wawancara” Desa Sarambu Kecamatan Porehu, 8 April 2023

pengelolaan keuangan agar pemerintah desa tidak terjebak dalam tata kelola keuangan yang menimbulkan penyimpangan”⁵²

Hasil wawancara peneliti dengan masyarakat selaku Ibu Maryana yaitu :

“Bentuk dukungan dari pemerintah desa untuk melaksanakan kegiatan yang sudah kami musyawarahkan itu adalah dengan memfasilitasi setiap kegiatan yang kami lakukan.”⁵³

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan dana desa sudah memperoleh dukungan dari manajemen puncak.

c. Perencanaan yang berfokus pada implementasi

Perencanaan akan efektif apabila implementasinya membantu mencapai tujuan organisasi. Oleh sebab itu setiap perencanaan harus dapat memberikan hasil akhir berupa tindakan yang mendasar pada sasaran-sasaran yang diinginkan.

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Desa Srambu yaitu Bapak Arwing Sebagai berikut:

“Tahapan dalam penetapan APBDEs terkait dengan pengelolaan keuangan desa meliputi pembuatan peta permasalahan dan potensi desa, menyusun rencana kegiatan pembangunan desa (RKP Desa) dan penyusunan perencanaan keuangan dituangkan dalam anggaran pendapatan dan biaya desa.”⁵⁴

Hasil Wawancara dengan Masyarakat desa Ibu Maryana

”Pengelolaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur jalan itu tidak terlalu terlaksana karena di desa srambu ini infrastruktur jalannya sudah

⁵² Arwing, Kepala Desa Srambu”Wawancara”. Desa Srambu Kecamatan Porehu, 5 April 2023

⁵³ Maryana, Masyarakat Desa Srambu “wawancara” Desa Srambu Kecamatan Porehu, 8 April 2023

⁵⁴ Arwing, Kepala Desa Srambu”Wawancara”. Desa Srambu Kecamatan Porehu, 5 April 2023

cukup bagus. Hanya pada perbaikan fasilitas umum seperti sekolah dan pasar.”⁵⁵

Kemudian hasil wawancara dengan Bapak Juwahid selaku Sekretaris Desa Sarambu :

“Dalam proses pengelolaan perencanaan pengelolaan keuangan desa biasanya terjadi hambatan yakni tiap dusun tidak dapat menyampaikan hasil musrenbang, kurangnya pemahaman kaur dan kasi dalam tugas dan fungsi namun akan kami evaluasi.”⁵⁶

Selanjutnya Hasil wawancara dengan Ibu Rani selaku masyarakat desa sarambu

“Sejauh ini tidak ada masalah, dan biasanya jika ada hambatan, itu akan diselesaikan oleh pemerintah desa.”⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaannya sudah berfokus pada implementasi.

d. Memilih orang-orang yang tepat

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Desa Sarambu yaitu Bapak Arwing Sebagai berikut:

“Kami selaku pemerintah desa memastikan seluruh tahapan untuk mencapai tujuan yang dilakukan dengan masyarakat sebagai pelaku utama”⁵⁸

Hasil Wawancara dengan Masyarakat desa Ibu Maryana

⁵⁵ Maryana, Masyarakat Desa Sarambu “wawancara” Desa Sarambu Kecamatan Porehu, 8 April 2023

⁵⁶ Juwahid, Sekertaris Desa Sarambu”Wawancara”. Desa Sarambu Kecamatan Porehu, 7 April 2023

⁵⁷ Rani, Masyarakat Desa Sarambu”Wawancara”. Desa Sarambu Kecamatan Porehu, 7 April 2023

⁵⁸ Arwing, Kepala Desa Sarambu”Wawancara”. Desa Sarambu Kecamatan Porehu, 5 April 2023

“Untuk pembangunan desa, semua masyarakat akan terlibat aktif, termasuk aparat desa juga.”⁵⁹

Kemudian hasil wawancara dengan Bapak Juwahid Selaku Sekretaris Desa Sarambu :

“Saya selaku kepala desa membentuk tim penyusun APBdes yang terdiri dari semua perangkat desa dan para pimpinan lembaga kemasyarakatan desa dengan ketua sekretaris desa.”⁶⁰

Selanjutnya Hasil wawancara dengan Ibu Rani selaku masyarakat desa sarambu

“Proses penyusunan APBDes dilakukan oleh aparat desa dengan mengacu pada hasil musyawarah dengan kami selaku masyarakat desa.”⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa sarambu telah memilih orang-orang yang tepat untuk bisa memberikan masukan dan umpan balik yang bagus dalam proses perencanaan dan dalam implementasi rencana.

Tabel 4.4 Analisis Efektivitas Perencanaan

No.	Uraian	Data
1.	Perencanaan di desain secara baik	Dalam menyusun rencana pembangunan pemerintah desa melakukan musyawarah desa antara masyarakat dengan pemerintah. Hasil musyawarah tersebut di susun dan di atur mengenai pelaksanaannya.

⁵⁹ Maryana, Masyarakat Desa Sarambu “wawancara” Desa Sarambu Kecamatan Porehu, 8 April 2023

⁶⁰ Juwahid, Sekertaris Desa Sarambu”Wawancara”. Desa Sarambu Kecamatan Porehu, 7 April 2023

⁶¹ Rani, Masyarakat Desa Sarambu”Wawancara”. Desa Sarambu Kecamatan Porehu, 7 April 2023

- | | |
|--|--|
| 2. Memperoleh dukungan dari Pemerintah desa membina dan manajemen puncak | mengawasi setiap penyelenggaraan khususnya pengelolaan keuangan agar pemerintah desa tidak terjebak dalam tata kelola keuangan yang menimbulkan penyimpangan |
| 3. Perencanaan berfokus pada implementasi | Dalam tahapan penetapan APBDes semuanya dituangkan dalam anggaran pendapatan dan biaya desa. |
| 4. Memilih orang-orang yang tepat | Kepala desa membentuk tim penyusun APBDes yang terdiri dari semua perangkat desa dan para pemimpin Lembaga kemasyarakatan. |

Sumber Reduksi Data

2. Evaluasi

Pada tahap evaluasi dilakukan peninjauan kembali pada pelaksanaan kegiatan yang dilakukan, evaluasi dilakukan oleh berbagai pihak baik dari tim pendamping desa, kecamatan maupun dari kabupaten (BPD). Adapun indikator pengevaluasian adalah sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.

a. Sistematis

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Desa Srambu yaitu Bapak Arwing

Sebagai berikut:

“Iya, sudah terevaluasi secara sistematis. Kami mengevaluasi seluruh kegiatan yang dilakukan pemerintah apakah sudah sesuai dengan rencana yang telah dimusyawarahkan. Evaluasi dilakukan oleh tim pendamping yang mengevaluasi laporan. Tahap pertama yang di evaluasi yaitu Pendidikan, yaitu operasional kendaraan Anak sekolah (BBM + Pemeliharaan), tahap kedua yaitu penyelenggaraan Pos Kesehatan desa, pemeliharaan jalan desa, pembangunan yaitu perkerasan jalan pemukiman dsn 1 SMA, pembinaan kemasyarakatan.”⁶²

Hasil Wawancara dengan Masyarakat desa Ibu Rani

“Menurut saya sudah terevaluasi secara sistematis tim yang melakukan evaluasi ini dari berbagai pihak, yaitu pihak kabupaten, kecamatan dan BPD.”⁶³

Kemudian hasil wawancara dengan Bapak Supardi Selaku Bendahara

Desa Sarambu :

“saya rasa, proses evaluasi ini tidak akan terkendala, semuanya berjalan dengan baik, evaluasi kami lakukan dengan baik, evaluasi kami lakukan dengan meninjau kembali hasil dari pelaksanaan kegiatan, tidak ada masyarakat yang ikut dalam pengevaluasian ini. Selain kegiatan yang di evaluasi laporan pertanggung jawaban juga di evaluasi.”⁶⁴

Selanjutnya Hasil wawancara dengan Ibu Rani selaku masyarakat desa sarambu

“Soal hambatan akan ditangani oleh pemerintah dan tim pendamping. Kami selaku masyarakat tidak ikut serta untuk hal itu.”

Dari hasil wawancara diatas disimpulkan bahwa kegiatan pengevaluasian telah terlaksana secara sistematis, pemerintah dan tim

⁶² Arwing, Kepala Desa Sarambu”Wawancara”. Desa Sarambu Kecamatan Porehu, 5 April 2023

⁶³ Rani, Masyarakat Desa Sarambu”Wawancara”.Desa Sarambu Kecamatan Porehu, 10 April 2023

⁶⁴ Juwahid, Bendahara Desa Srambu”Wawancara”. Desa Sarambu Kecamatan porehu, 11 April 2023

pendamping melaksanakan pengevaluasian tersebut dengan baik tanpa kendala.

b. Terarah

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Desa Sarambu yaitu Bapak Arwing Sebagai berikut:

“Yang paling berperan dalam mengarahkan jalannya evaluasi adalah pemerintah desa. kami selaku pemerintah mengarahkan evaluasi pemeliharaan lampu jalan desa (pengadaan balon) dimana yang sebelumnya banyak lampu yang tidak berfungsi sekarang semua lampu sudah berfungsi, yang ke dua pembangunan jalan usaha tani dusun 4 juga sudah terealisasi dengan baik”⁶⁵

Kemudian hasil wawancara dengan Bapak Burhan selaku masyarakat desa sarambu yaitu :

“ Pemerintah desa yang berwenang untuk mengarahkan proses evaluasi kerja, kami selaku masyarakat merasakan manfaatnya seperti lampu jalan yang sebelumnya banyak yang tidak berfungsi sekarang sudah berfungsi dengan baik”⁶⁶

Selanjutnya Bapak Supardi selaku Bendahara desa sarambu

“Tidak ada masyarakat yang ikut serta dalam pengevaluasian ini.”⁶⁷

⁶⁵ Arwing, Kepala Desa Sarambu”Wawancara”. Desa Sarambu Kecamatan Porehu, 5 April 2023

⁶⁶ Burhan, Masyarakat Desa Sarambu”Wawancara”. Desa Sarambu Kecamatan Porehu, 10 April 2023

⁶⁷ Supardi, Bendahara Desa Sarambu”Wawancara”. Desa Sarambu Kecamatan Porehu, 11 April 2023

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa yang berperan dalam melakukan pengarahannya evaluasi , masyarakat desa tidak ikut serta dalam pengarahannya tersebut.

c. Terpadu

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Desa Sarambu yaitu Bapak Arwing Sebagai berikut:

“Program ketahanan pangan secara terpadu, kami selenggarakan dengan menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat desa dalam mengelola sumber daya pertanian seperti kakao, merica, nilam untuk kecukupan pangan. Program tani ini juga kami berikan bantuan berupa sembako.”⁶⁸

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Supardi selaku Bendahara desa sarambu :

“Bentuk pengevaluasian yang kami berikan adalah meninjau kembali apakah bantuan yang kami berikan sudah sampai ke tangan yang tepat.”⁶⁹

Adapun wawancara dengan masyarakat desa sarambu yaitu Ibu Rani :

“ Kami tidak berperan dalam pengevaluasian, namun kami membantu pemerintah dalam menjalankan evaluasi dengan cara melaporkan jumlah dan bentuk bantuan yang kami terima.”⁷⁰

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa sarambu memberikan bantuan kepada masyarakat dan bentuk pengevaluasian

⁶⁸ Arwing, Kepala Desa Sarambu”Wawancara”. Desa Sarambu Kecamatan Porehu, 5 April 2023

⁶⁹ Supardi, Kepala Desa Sarambu”Wawancara”. Desa Sarambu Kecamatan Porehu, 11 April 2023

⁷⁰Rani, Masyarakat Desa Sarambu”Wawancara”.Desa Sarambu Kecamatan Porehu, 10 April 2023

yang dilakukan yaitu meninjau kembali apakah bantuan sudah sampai ke tangan yang tepat. Dan masyarakat membantu pemerintah dengan melaporkan jumlah dan bentuk bantuan yang diterima.

d. Menyeluruh

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Desa Sarambu yaitu Bapak Arwing Sebagai berikut:

“Pengevaluasian yang kami lakukan kami laksanakan secara menyeluruh, mulai dari laporan keuangan hingga laporan pertanggung jawaban dan baliho yang di pasang di halaman kantor desa yang isinya itu penggunaan dana desa .”⁷¹

Selanjutnya Hasil wawancara dengan Bapak Burhan selaku masyarakat desa sarambu :

“Seluruh kegiatan yang telah direncanakan bersama hampir semuanya berjalan dengan baik, artinya pemerintah sudah melakukan pengevaluasian dengan baik dan menyeluruh dapat dilihat dengan baliho yang di pasang oleh pemerintah desa mengenai anggaran dana desa.”⁷²

Kemudian Bapak Supardi selaku Bendahara desa sarambu mengatakan:

“Dalam pengevaluasian jalannya kegiatan yang bersumber dari ADD tidak semua masyarakat desa ikut serta hanya pemerintah desa dan tim pendamping.”⁷³

⁷¹A rwing, Kepala Desa Sarambu”Wawancara”. Desa Sarambu Kecamatan Porehu, 5 April 2023

⁷²Burhan, Masyarakat Desa Sarambu”Wawancara”. Desa Sarambu Kecamatan Porehu, 10 April 2023

⁷³Supardi, Kepala Desa Sarambu”Wawancara”. Desa Sarambu Kecamatan Porehu, 11 April 2023

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah sudah melakukan pengevaluasian secara menyeluruh, dan seluruh kegiatan yang direncanakan hampir semua berjalan dengan baik. Meskipun tidak semua masyarakat ikut serta dalam pengevaluasian tetapi masyarakat dan tim pendamping yang mengevaluasi secara menyeluruh.

e. Tanggap Terhadap Perubahan

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Desa Sarambu yaitu Bapak Arwing Sebagai berikut:

“Dampaknya adalah meningkat. Desa kami tidak lagi berstatus desa tertinggal adalah salah satu bukti dampak positif adanya dana desa bagi kemajuan desa.”⁷⁴

Selanjutnya wawancara masyarakat desa sarambu yaitu Ibu Rina :

“ Menurut saya dana desa ini meningkatkan kemajuan desa. Adanya dana desa sangat banyak membantu kami mulai dari bangunan-bangunan dan beberapa batuan yang biasa kami terima berupa pangan dan fasilitas kerja.”⁷⁵

Kemudian Bapak Burhan selaku masyarakat desa sarambu juga mengatakan :

“Harapan saya kepada pemerintah semoga dengan adanya dana desa dan serangkaian prosesnya yang sudah dilakukan dengan baik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.”⁷⁶

⁷⁴ A rwing, Kepala Desa Sarambu”Wawancara”. Desa Sarambu Kecamatan Porehu, 5 April 2023

⁷⁵ Rani, Masyarakat Desa Sarambu”Wawancara”.Desa Sarambu Kecamatan Porehu, 10 April 2023

⁷⁶ Burhan, Masyarakat Desa Sarambu”Wawancara”.Desa Sarambu Kecamatan Porehu, 11 April 2023

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya dana desa desa sarambu tidak lagi tertinggal. Dengan adanya dana desa masyarakat memperoleh bantuan berupa pangan dan fasilitas kerja.

Tabel 4.5 Analisis Evaluasi Perencanaan

No.	Uraian	Data
1.	Sistematis	Pengevaluasian dilakukan oleh berbagai pihak baik dari pemerintah desa, pihak kabupaten, kecamatan dan BPD, Tahap pertama yang di evaluasi yaitu Pendidikan, yaitu operasional kendaraan Anak sekolah (BBM + Pemeliharaan), tahap kedua yaitu penyelenggaraan Pos Kesehatan desa, ke 3 pemeliharaan jalan desa, pembangunan yaitu perkerasan jalan pemukiman dsn 1 SMA, ke 4 pembinaan kemasyarakatan. Dan semua tahap sudah terevaluasi secara sistematis.
2.	Terarah	Pemerintah desa yang sangat berperan dalam mengarahkan jalannya evaluasi, seperti pemeliharaan lampu jalan desa (pengadaan balon) dimana yang sebelumnya banyak lampu yang tidak berfungsi sekarang semua lampu sudah berfungsi, pembangunan jalan usaha tani dusun 4 juga sudah terealisasi dengan baik.
3.	Terpadu	Pemerintah menyelenggarakan dengan mengedepankan kemampuan

<p>4. Menyeluruh</p>	<p>masyarakat dalam mengelola sumber daya pertanian seperti kakao, merica nilam untuk kecukupan pangan. Selain itu pemerintah memberikan sumbangan berupa sembako untuk program ketahanan pangan secara terpadu. Pemerintah melakukan evaluasi apakah bantuan yang diberikan sudah sampai ke tangan yang tepat.</p> <p>Semua kegiatan yang telah direncanakan hampir semuanya berjalan dengan baik, karena sudah ada baliho mengenai penggunaan dana desa, dan juga papan informasi yang di tempel di kantor desa berisi foto kegiatan. pengevaluasian yang dilaksanakan dilakukan secara menyeluruh mulai dari laporan keuangan hingga laporan pertanggungjawaban</p>
<p>5. Tanggap terhadap perubahan</p>	<p>Desa sarambu tidak lagi berstatus desa tertinggal karena adanya ADD adalah salah satu bentuk positif adanya dana desa bagi kemajuan desa.</p>

Sumber Reduksi Data

C. Pembahasan

1. Efektivitas Fungsi Perencanaan Dana Desa

Pemerintah desa dapat Menyusun sebuah perencanaan pembangunan desa harus sesuai dengan kewenangan sebagai pemerintah desa, namun harus

tetap mengacu pada perencanaan pembangunan yang sudah dibuat ditingkat kabupaten/kota.

Menurut Kessa, Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjenjang meliputi:⁷⁷

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) tahunan; dan
2. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Berdasarkan peraturan yang berlaku tahap perencanaan dimulai dengan musyawarah desa, dimanah musyawarah desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Unsur masyarakat yang dimaksud adalah antara lain tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, kelompok perempuan.

Perencanaan pengelolaan keuangan dana desa meliputi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) sedangkan penganggaran Keuangan

⁷⁷Dewi Erowati, Kebijakan Dana Desa Bagi Pemberdayaan Masyarakat Dan Pembangunan Desa (Surabaya: Sconpindo Media Pustaka,2021).12

Desa meliputi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

Soedomo mengatakan bahwa setidaknya ada 4 (empat) yang menjamin proses perencanaan dapat mencapai efektivitas, Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perencanaan sudah dapat dikatakan efektif karena sudah sesuai dengan 4 indikator proses perencanaan. Dimana indikator yang pertama yaitu proses perencanaan sudah di desain secara baik oleh pemerintah desa saramabu, yang kedua sudah memperoleh dukungan dari manajemen puncak, dimana berupa perhatian yang jelas dan serta berkelanjutan, yang ke tiga perencanaan dana desa saramabu sudah berfokus pada implementasi. Yang keempat pemerintah desa saramabu sudah memilih orang-orang yang tepat untuk dapat memberikan masukan dan umpan balik yang bagus dalam proses perencanaan dan dalam implementasi rencana.

Esty Ismail dalam penelitiannya menemukan bahwa perencanaan yang dilakukan sudah efektif karena sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, baik dalam tahap penyusunan perencanaan juga pihak-pihak yang terlibat didalam-Nya. Hal ini tergambar dalam UU Desa Pasal 80 tentang perencanaan.⁷⁸ Penelitian ini memperoleh hasil penelitian bahwa proses perencanaan sudah dapat dikatakan efektif karena sudah sesuai dengan 4 indikator proses perencanaan.

⁷⁸ Esty Ismail, "Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan (Studi Kasus Tingkat Desa Kecamatan Bua Kabupaten Luwu)", Skripsi, IAIN Palopo, 2022

2. Efektivitas Pengevaluasian Dana Desa

Menurut Arikunto pengevaluasian adalah serangkaian kegiatan yang ditunjukkan untuk mengukur keberhasilan suatu program atau kebijakan.

⁷⁹Evaluasi merupakan tahapan yang dimanah memastikan bahwa jalannya program sudah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Evaluasi diperlukan untuk memastikan bawa setiap tahapan pengelolaan dana desa tidak terjadi penyimpangan. Adapun faktor yang dinilai yaitu sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.

Subroto mengatakan bahwa setidaknya ada 5 (lima) yang menjamin proses pengevaluasian dapat mencapai efektivitas, Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pengevaluasian dana desa sudah dapat dikatakan efektif karna sudah sesuai dengan indikator pengevaluasian dimanah indikator yang pertama yaitu sistematis Pengevaluasian dilakukan oleh berbagai pihak baik dari pemerintah desa, pihak kabupaten, kecamatan dan BPD, Tahap pertama yang di evaluasi yaitu Pendidikan, yaitu operasional kendaraan Anak sekolah (BBM + Pemeliharaan), tahap kedua yaitu penyelenggaraan Pos Kesehatan desa, ke 3 pemeliharaan jalan desa, pembangunan yaitu perkerasan jalan pemukiman dsn 1 SMA, ke 4 pembinaan kemasyarakatan. Dan semua tahap sudah terevaluasi secara sistematis.

Indikator yang kedua yaitu Terarah hasil Pemerintah desa yang sangat berperan dalam mengarahkan jalannya evaluasi, seperti pemeliharaan lampu jalan

⁷⁹ Husen Alting, Data Dan Informasi Manfaat Dana Desa Di Profinsi Maluku Utara (Maluku, 2020).16

desa (pengadaan balon) dimana yang sebelumnya banyak lampu yang tidak berfungsi sekarang semua lampu sudah berfungsi, pembangunan jalan usaha tani dusun 4 juga sudah terealisasi dengan baik. Indikator yang ke tiga yaitu Terpadu hasil wawancara yaitu Pemerintah menyelenggarakan dengan mengedepankan kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya pertanian seperti kakao, merica nilam untuk kecukupan pangan. Selain itu pemerintah memberikan sumbangan berupa sembako untuk program ketahanan pangan secara terpadu. Pemerintah melakukan evaluasi apakah bantuan yang diberikan sudah sampai ke tangan yang tepat.

Adapun indikator yang ke empat adalah Menyeluruh Semua kegiatan yang telah direncanakan hampir semuanya berjalan dengan baik, karena sudah ada baliho mengenai penggunaan dana desa, dan juga papan informasi yang di tempel di kantor desa berisi foto kegiatan. pengevaluasian yang dilaksanakan dilakukan secara menyeluruh mulai dari laporan keuangan hingga laporan pertanggungjawaban. Adapun indikator yang terakhir yaitu tanggap terhadap perubahan hasil wawancara yaitu dengan adanya dana desa desa sarambu tidak lagi tertinggal. Dengan adanya dana desa masyarakat memperoleh bantuan berupa pangan dan fasilitas kerja.

Esty Ismail dalam penelitiannya menemukan bahwa evaluasi dari semua tahapan sudah dilakukan dengan regulasi yang berlaku, semua pihak telah melakukan bagiannya. Hal ini terbukti dimanah narasumber mengatakan tidak terjadi masalah ataupun hambatan selama tahapan-tahapan pengelolaan dana desa

dilakukan.⁸⁰ Dan penelitian ini memperoleh hasil penelitian bahwa pengevaluasian dana desa sudah dapat dikatakan efektif karna sudah sesuai dengan indikator pengevaluasian dimanah indikator pengevaluasian yaitu sistematis, terarah, menyeluruh, terpadu dan tanggap terhadap perubahan.



⁸⁰ Esty Ismail, "Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan (Studi Kasus Tingkat Desa Kecamatan Bua Kabupaten Luwu)", Skripsi, IAIN Palopo, 2022

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Efektivitas Fungsi Perencanaan Dana Desa

Proses perencanaan sudah dapat dikatakan efektif karena sudah sesuai dengan 4 indikator proses perencanaan. Dimanah indikator yang pertama yaitu proses perencanaan sudah di desain secara baik oleh pemerintah desa saramabu, yang kedua sudah memperoleh dukungan dari manajemen puncak, dimanah berupa perhatian yang jelas dan serta berkelanjutan, yang ke tiga perencanaan dana desa saramabu sudah berfokus pada implementasi. Yang keempat pemerintah desa saramabu sudah memilih orang-orang yang tepat untuk dapat memberikan masukan dan umpan balik yang bagus dalam proses perencanaan dan dalam implementasi rencana.

2. Efektivitas Fungsi Pengevaluasian Dana Desa

Efektivitas pengevaluasian dana desa sudah dapat dikatakan efektif karna sudah sesuai dengan indikator pengevaluasian yaitu sistematis dimanah pengevaluasian dilakukan oleh berbagai pihak baik dari pemerintah desa, pihak kabupaten, kecamatan dan BPD, seluruh kegiatan yang dilakukan apakah sudah sesuai dengan rencana yang telah di musyawarahkan. Indikator yang kedua yaitu terarah dimanah pemerintah yang sangat berperan dalam mengarahkan jalannya evaluasi.

Indikator yang ketiga terpadu, dimanah pemerintah menyelenggarakan dengan mengedepankan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan sumber

daya pertanian, perkebunan untuk kecukupan pangan, selain itu pemerintah juga memberikan sumbangan berupa sembako untuk program ketahanan pangan secara terpadu. Indikator yang keempat menyeluruh, semua kegiatan yang telah direncanakan hampir semuanya berjalan dengan baik, pengevaluasian yang dilakukan secara menyeluruh mulai dari laporan keuangan hingga laporan pertanggungjawaban. Indikator yang ke lima yaitu tanggap terhadap perubahan dimanah desa sarambu tidak lagi berstatus desa tertinggal karena adanya ADD adalah salah satu bentuk positif adanya dana desa bagi kemajuan desa.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah

Diharapkan Pemerintah desa lebih memaksimalkan lagi penyebaran informasi mengenai penggunaan dana desa, dan disampaikan kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali menggunakan media-media informasi yang telah ada selama ini

2. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan lebih memperhatikan informasi-informasi yang telah disebarkan oleh pemerintah desa agar tidak terjadi kesalahpahaman berkaitan dengan dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa serta sadar akan pentingnya pengetahuan tentang penggunaan dana desa demi mewujudkan desa yang sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfianto. *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur*. Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo, 2020.
<http://journal.stiem.ac.id/index.php/jurakun/article/view/518%0Ahttp://journal.stiem.ac.id/index.php/jurakun/article/viewFile/518/340>.
- Antou, Putri, Vekie Rumante, and Mauna TH B Maramis. “*Efektivitas Dana Desa Terhadap Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara*.” Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi 19, no. 02 (2019): 131–40.
- Asima Yanti Siahaan, Piki Darma Kristrian Pardede. *Transformasi Pembangunan Melalui Pelayanan Publik*. Jawa Tengah: PT Tena Persada Kerta Utama, 2022.
- Dailiati, Surtya. *Kebijakan Retribusi Kebersihan Dalam Meningkatkan Kepuasan Masyarakat*. Surabaya: CV Jakad Publishing, 2018.
- Ferdinan. *Evaluasi Program Pendidikan Islam*. Sumatra Barat: Insan Cendekia Mandiri, 2022.
- Irene Svinarky, Lukman Hakim @all. *Bum Desa Sebagai Kekuatan Ekonomi Baru*. Jawa Tengah: Anggota Ikapi, 2022.
- Irmansyah, Irmansyah, Sri Wahyuni Mustafa, and Rahmad Solling Hamid. “*Efektivitas Kebijakan Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur*.” Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah) 4, no. 2 (2021): 1086–95.
<https://doi.org/10.36778/jesya.v4i2.479>.
- Kaharuddin, K, and R Rusli. “*Evaluasi Program Dana Desa*.” Forum Ekonomi 23, no. 4 (2021): 623–31.
- Kamalia, La Ode. *Perencanaa Dan Evaluasi Kesehatan*. Jawa Barat: CV Media

Sains Indonesia, 2021.

Ma, *Manajemen Sumber Daya*. Yogyakarta: Samudra Biru, 2019.

Masnilah, Nelly. *Akutansi Keuangan Pemerintah Desa*. Sumatera Barat: Cv Mitra Cendikia, 2021.

Nailufar, Nibra. *Definisi Dan Unsurnya*. Yogyakarta: CV Media Sains Indonesia, 2020.

Nurmalasari, Dewi, and Endang Irawan Supriyadi. "Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung)." *Jurnal Identitas* 1, no. 1 (2021): 64–74. <https://doi.org/10.52496/identitas.v1i1.105>.

Permana, Sidik. *Antropologi Perdesaaan Dan Pembangunan Berkelanjutan*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019.

Pratama, Rheza. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Anggota Ikapi, 2020.

Rinda, Rachmatullaily Tinakartika. *Pengantar Manajemen Bisnis*. Jakarta: Jakarta, 2022.

Setia Budi Kurniawan, Theresia Wea. *Akutaqnbilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*. Malang: Media Nusa Creativ, 2021.

Siti Rosmayati, Arman Maulana. *Manajemen Koperasi*. Jakarta, indonesia: Guepedia, 2020.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitaif,Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Sumolang, S G, I S Saerang, J B Maramis, Efektivitas Perencanaan, Dana Desa, D I Desa, and S E A Kecamatan. "Kabupaten Minahasa The Effectiveness Of Village Fund Planning In Sea Village Pineleng District Minahasa Regency *Jurnal EMBA* Vol . 9 No . 4 Oktober 2021 , Hal . Pengelolaan Alokasi Dana Desa Juga Harus Transparan Guna Mewujudkan Pengembangan , Kegi" 9,

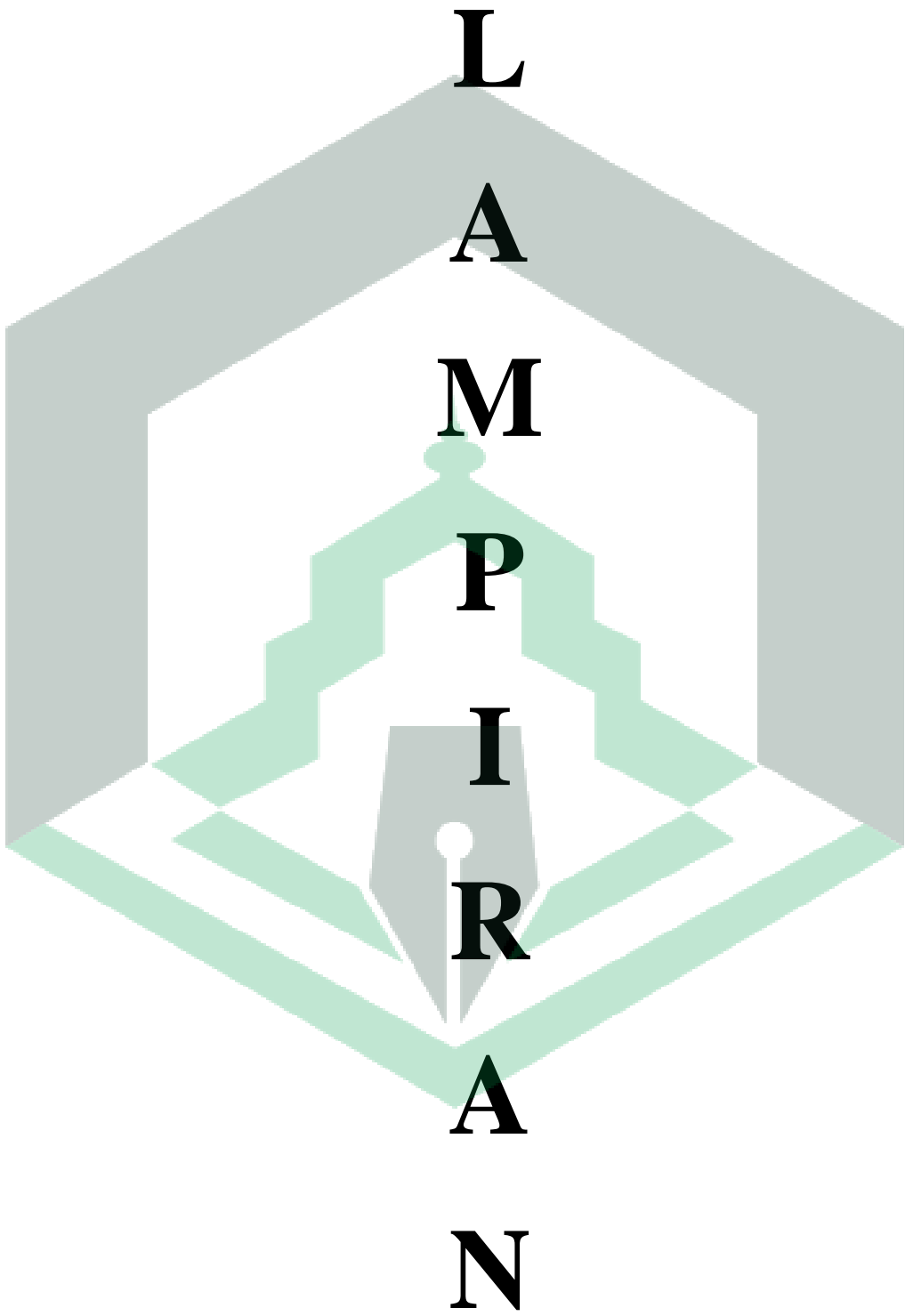
no. 4 (2021)

Tjokroamidjojo. *Pengantar Akutansi Pembangunan*. Jakarta: PT Penerbit Qiara Media, 2011.

Tripuro, R Widodo. *Regulasi Desa*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019.

Yusuf, A Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2017.





Lampiran 1

Pedoman Wawancara

A. Indikator Efektivitas Perencanaan

1. Bagaimana tahapan pengelolaan ADD ?
2. Apa saja agenda pokok musyawarah desa dalam menyusun rencana pembangunan desa ?
3. Bagaimana bentuk dukungan yang diberikan oleh pemerintah desa dalam perencanaan pengelolaan dana desa
4. Adakah tahapan dalam penetapan APBdes terkait dengan pengelolaan keuangan desa ? dalam hal ini saat ada kegiatan pembangunan infrastruktur jalan
5. Bila mana terjadi kendala dalam proses pengelolaan keuangan desa apakah ada evaluasi ?
6. Siapa yang terlibat dalam pembangunan desa ?
7. Siapa yang berperan dalam proses penyusunan dalam proses APBDES

B. Indikator Pengevaluasian

1. Apakah menurut bapak segala kegiatan RKB oleh ADD telah Terevaluasi secara sistematis
2. Bagaimana jika dalam kasus evaluasi yang secara sistematis terkendala apa solusi yang akan diberikan agar semuanya bisa kembali berjalan secara sistematis
3. Siapakah yang paling berperan dalam mengarahkan jalannya evaluasi kinerja yang bersumber dari ADD

4. Bagaimana Partisipasi masyarakat dalam mengevaluasi kegiatan yang terarah
5. Bagaimana upaya yang diberikan pemerintah untuk program ketahanan pangan secara terpadu di desa sarambu
6. Dalam berjalannya program ketahanan terpadu tersebut bentuk pengevaluasian apa yang dilakukan
8. Apakah dalam pengevaluasian terhadap kegiatan yang dananya bersumber dari dana desa telah terlaksana secara menyeluruh
9. Apakah seluruh masyarakat desa ikut serta dalam mengevaluasi jalannya kegiatan yang bersumber dari ADD
10. Bagaimana dampak dana desa bagi kemajuan desa menurun atau meningkat
11. Perubahan apa yang Anda harapkan dengan adanya serangkaian pengevaluasian yang telah dilakukan

Lampiran 2

Dokumentasi Wawancara dengan Responden



Gambar kantor desa sarambu yang beralamatkan di desa sarambu kecamatan porehu kabupaten kolaka utara.



Gambar kedua, menggambarkan bahwa wawancara dilakukan oleh peneliti secara langsung dengan mewawancarai Pak Arwing selaku kepala desa sarambu.



Gambar ketiga, menggambarkan bahwa wawancara dilakukan oleh peneliti secara langsung dengan mewawancarai Pak Juwahid selaku Sekretaris desa sarambu



Gambar ketiga, menggambarkan bahwa wawancara dilakukan oleh peneliti secara langsung dengan mewawancarai Ibu Maryana selaku masyarakat desa sarambu.



Gambar keempat, menggambarkan bahwa wawancara dilakukan oleh peneliti secara langsung dengan mewawancarai Ibu Rani selaku masyarakat desa sarambu.



Lampiran 3

misna rais

ORIGINALITY REPORT

22%
SIMILARITY INDEX

22%
INTERNET SOURCES

7%
PUBLICATIONS

7%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	2%
2	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
3	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	1%
4	www.ilmu-ekonomi-id.com Internet Source	1%
5	doc-pak.undip.ac.id Internet Source	1%
6	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	1%
7	eprints.umm.ac.id Internet Source	1%
8	repository.ummat.ac.id Internet Source	<1%
9	www.scribd.com Internet Source	<1%

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp : 1 (Satu) Skripsi
Hal : Skripsi an. Misna

Yth Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr.wb

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Misna
NIM : 19 0403 0185
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Efektivitas Fungsi Perencanaan Dan Pengevaluasian Dana Desa Di Desa Sarambu Kecamatan Porehu Kabupaten Kolaka Utara

menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut.

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur Dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb

Tim Verifikasi

1. Edi Indra Setiawan, S.E., M.M
Tanggal: Juli 2023

2. Fadilla, S.AP
Tanggal: 27 Juli 2023

(.....)

(.....)



ENGLISH SKILL

By GLOBAL OPERATION INDONESIA

SK Kumham : AHU-0013778.AH.01.04.Tahun 2020

SK Diknas : 421.9/4955/418.20/2020

Jl. Sakura No. 18 Tulungrejo Pare Kediri Jawa Timur

Telp. 0812-8253-2661 E-mail : englishskillid@gmail.com

Web : www.englishskill.id

CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : MISNA
Place, Date of Birth : PONGGI, 2000-01-21
Registration No : 23050108

Has successfully completed

Computer Based TOEFL (Test of English as a Foreign Language)

Listening Comprehension : 37
Structure & Written Expression : 40
Reading Comprehension : 47
Total Score : 413
Range Score (min-max) : 217-677

This certificate is valid for 2 years after the date released



SCAN TO CONFIRM

Kediri, 2023-05-08
Director of ES



Rohmatan Lil Alamin



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

Syahadah

Nomor : In.19/PP/PT/MAHAD AL-JAMI'AH/ 237-VII/2020

Diberikan kepada :

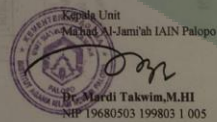
MISNA

NIM : 19 0403 0185

Setelah mengikuti Program Ma'had Al-Jami'ah Institut Agama Islam Negeri Palopo
Sebagai tanda bukti diberikan Syahadah ini berikut hak sesuai dengan peraturan yang berlaku
Dikeluarkan di Palopo pada tanggal Empat Juli Dua Ribu Dua Puluh



Abdul Pirol, M.Ag.
NIP 19691104 199403 1 004



Dr. Mardi Takwim, M.HI
NIP 19680503 199803 1 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

TRANSKRIP NILAI MAHASISWA PROGRAM MA'HAD AL-JAMI'AH

N A M A : MISNA
N I M : 19 0403 0185
FAK/PRODI : FEBI/D3

NO	MATA KULIAH	SEMESTER	NILAI	
			ANGKA	HURUF
1	Tahsinul Qiro'ah	I	90	A
2	Fiqih Ibadah	II	95	A+
JUMLAH			185	
RATA-RATA			92,50	

Predikat Kelulusan : Amat Baik / Baik / Cukup / Kurang

Palopo, 04 Juli 2020
Kepala Unit
Ma'had Al-Jami'ah IAIN Palopo



Dr. Mardi Takwim, M.HI
NIP 19680503 199803 1 005



KARTU KONTROL
SEMINAR HASIL SKRIPSI

Nama : Misna
NIM : 1904030105
Prodi : Manajemen Bisnis Syariah

NO	HARI/TGL	NAMA MAHASISWA	JUDUL SKRIPSI	PARAF PIMPINAN UJIAN	KET.
1	Jumat/09/Juni 2023	Ayu Destari	Pengaruh Digital Marketing dan Brand Loyalty melalui media sosial tiktok shop terhadap Pengambilan keputusan pembelian produk Cleborut Juice for skin		
2	Jumat/09/Juni	Anar Awwal	Pengaruh Brand Equity terhadap keputusan pembelian konsumen pada toko kue gado-gado		
3	Jumat/09/Juni 15/	Nur Khairunnah	Pengaruh influencer marketing dan viral marketing terhadap loyalitas pengguna skincare di kalangan mahasiswa febi /Iainpalopo		
4	15/06/2023	Uma Khairisma Irfwan	Pengaruh elektronik word of mouth terhadap keputusan pembelian dalam penggunaan skincare gearitt whitening pad mahasiswa		
5	15/06/2023	Safitri Andar Rofiq	Optimisasi strategi digital marketing melalui platform media sosial di Pariban cafe masamba		
6	11/07/2023	Sarif Aji	Pengaruh customer Bonding terhadap loyalitas pelanggan Toko Nanto kasmita		
7					
8					
9					
10					

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Dr. Takdir, SH., M.H
NIP 197907242003121002

NB.:

- Kartu ini dibawa setiap mengikuti ujian
- Setiap mahasiswa wajib mengikuti minimal 5 kali seminar sebelum seminar hasil.

Buku Kontrol Penulisan Skripsi**LEMBAR KONSULTASI SETELAH UJIAN
SEMINAR HASIL PENELITIAN**

Konsultasi ke, _____ Hari Tanggal, _____

Materi Konsultasi

No.	Uraian
1	Sistematika Penulisan,
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

Pembimbing 1.

NIP, _____

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



MISNA, lahir pada tanggal 21 januari 2000 di Desa Sarambu Kecamatan Porehu Kabupaten Kolaka Utara. Penulis adalah anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan Ayah Rais dan Ibu Rahmi. Saat ini penulis tinggal di Desa Sarambu Kecamatan Porehu Kabupaten Kolaka Utara. Penulis mulai masuk jenjang Pendidikan di SDN 1 Sarambu pada tahun 2007 dan tamat pada tahun 2013. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan Pendidikan di SMP Negeri 2 Batuputih dan tamat pada tahun 2016. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan Pendidikan di SMK Negeri 10 Makassar dan tamat pada tahun 2019. Kemudian penulis melanjutkan studi pada tahun 2019 dan terdaftar sebagai mahasiswa program studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri Palopo. Pada akhirnya penulis membuat tugas akhir skripsi untuk menyelesaikan Pendidikan S1 dengan judul skripsi “Efektivitas Fungsi Perencanaan Dan Pengevaluasian Dana Desa Di Desa Sarambu Kecamatan Porehu Kabupaten Kolaka Utara”. Demikianlah Riwayat hidup peneliti.